

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULANAN MENURUT PENGELUARAN

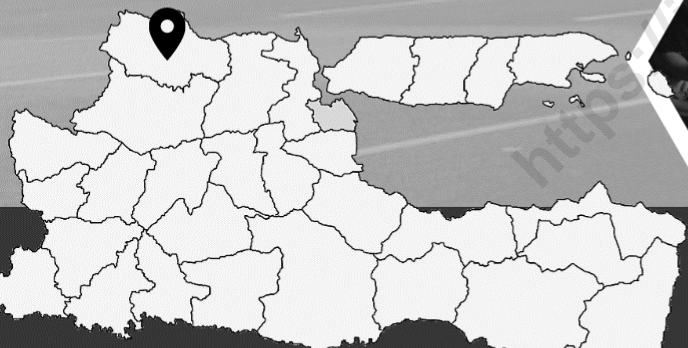
2017-2021



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULANAN

MENURUT PENGELUARAN

2017-2021



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULANAN
MENURUT PENGELUARAN
2017-2021**

ISSN : 2746-573x
Katalog BPS : 9302020.35
Nomor Publikasi : 35000.2227

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 79 halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur
Penyunting : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur
Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Diterbitkan Oleh : © BPS Provinsi Jawa Timur

Dicetak Oleh : PT Sinar Murni Indoprinting

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa
izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

TIM PENYUSUN

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA
TIMUR TRIWULANAN MENURUT PENGELUARAN 2017-2021**

Pengarah :

Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si

Penanggung Jawab :

Debora Sulistya Rini M.Si

Penyunting dan Editor :

Riena Widianingtyas S.Si, M.T

Penulis dan Pengolah Data :

Akhmad Dardiri SST, M.M

Marfuah Apriyani, S.ST

Haryono, S.ST

Desain Cover dan Tata Letak :

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur Triwulanan Menurut Pengeluaran 2017-2021 ini merupakan perangkat data ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi Jawa Timur. Publikasi ini memuat tinjauan perkembangan perekonomian Provinsi Jawa Timur Triwulanan Menurut Pengeluaran yang disajikan dalam analisis deskriptif, gambar dan tabel-tabel. Penyajiannya atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan dalam persentase untuk distribusi maupun pertumbuhan.

Publikasi yang disusun oleh Bidang Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik, BPS Provinsi Jawa Timur. Data yang disajikan dalam publikasi ini adalah PDRB menurut pengeluaran dari tahun 2017 hingga 2021 disertai dengan ruang lingkup dan sumber data yang digunakan pada masing-masing komponen.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur sehingga terbitnya buku ini.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Surabaya, Juli 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Timur,

Dr.Dadang Hardiwan, S.Si., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	7
1.3 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN.....	9
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT.....	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	15
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	18
2.5 Perubahan Inventori.....	22
2.6 Ekspor Impor.....	26
BAB III PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULANAN.....	29
3.1 Perekonomian Provinsi Jawa Timur Triwulanan Tahun 2017-2021.....	29
3.2 Perekonomian Provinsi Jawa Timur Triwulanan Tahun 2020.....	46
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	PDRB Triwulanan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan (2010=100) Tahun 2017-2021 (triliun rupiah) 29
Gambar 2	Laju Pertumbuhan y-on-y Triwulanan Tahun 2017-2021 (persen) 31
Gambar 3	Laju Pertumbuhan c-to-c Triwulanan Tahun 2017-2021 (persen) 33
Gambar 4	Laju Pertumbuhan q-to-q Triwulanan Tahun 2017-2021 (persen) 34
Gambar 5	Laju Pertumbuhan q-to-q Triwulanan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga Tahun 2017-2021 (persen) 36
Gambar 6	Laju Pertumbuhan q-to-q Triwulanan Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah tangga Tahun 2017-2021 (persen) 37
Gambar 7	Laju Pertumbuhan q-to-q Triwulanan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2017-2021 (persen)..... 38
Gambar 8	Laju Pertumbuhan q-to-q Triwulanan Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2017-2021 (persen) 40
Gambar 9	Laju Pertumbuhan q-to-q Triwulanan Ekspor Luar Negeri Tahun 2017-2021 (persen) 42
Gambar 10	Laju Pertumbuhan q-to-q Triwulanan Impor Luar Negeri Tahun 2017-2021 (persen) 43
Gambar 11	Rata-rata Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (persen) 45

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)..... 59
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)..... 63
Tabel 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Persen)..... 67
Tabel 4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Persen)..... 71
Tabel 5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Triwulanan Menurut Pengeluaran (q to q) Tahun 2017-2021 (Persen)..... 75
Tabel 6	Perubahan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Triwulanan (2010 = 100) Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Persen) 79
Tabel 7	Laju Perubahan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Triwulanan (2010 = 100) Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (persen) 83

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang berada di suatu wilayah pada periode tertentu. Data PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi perekonomian wilayah tersebut. Selain dihitung selama periode setahun sekali, PDRB juga dihitung setiap triwulan.

Berhasil tidaknya pembangunan suatu wilayah tidak lepas dari perkembangan perekonomian wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi (*economic development*) dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan salah satu gambaran terjadinya kenaikan nilai PDRB yang juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, pembangunan ekonomi juga merupakan proses multidimensional yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam struktur budaya sosial masyarakat serta kemungkinan juga akan terjadi percepatan (akselerasi) pertumbuhan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan tersebut di atas diharapkan dapat pula mengurangi ketimpangan serta pemberantasan kemiskinan absolut.

Tinggi rendahnya peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Selain itu pembangunan ekonomi diharapkan juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu juga sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Proses pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Atau dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dari faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya dari satu periode ke periode lainnya.

Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan produk nasional bruto di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik.

Di era desentralisasi kebijakan dan otonomi daerah seperti sekarang ini, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di beberapa bidang tertentu. Salah satu diantaranya pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan segenap potensi daerah dan mengelola sumber kekayaan alamnya serta menentukan prioritas dan arah program pembangunan ekonomi daerah tersebut.

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah sangat memerlukan berbagai macam data statistik sebagai dasar penentuan strategi dan kebijaksanaan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu juga dimonitor dan dievaluasi hasilnya. Salah satu data statistik yang merupakan indikator ekonomi makro adalah data PDRB, yang di dalamnya mencakup struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) yang mutlak sangat diperlukan untuk memperoleh gambaran keadaan perekonomian pada masa lalu dan masa kini serta sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pembangunan diberbagai bidang akan lebih baik dan berdaya guna apabila didukung dengan perencanaan yang matang sebagai dasar penentuan strategi,

pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sebelumnya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan yang baik, perlu digunakan data-data yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada saat tertentu agar kebijakan dan strategi yang akan diambil dapat dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah data PDRB. Data PDRB dihitung baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 yang diharapkan dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Dalam menghitung PDRB digunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan

dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Publikasi ini menyajikan data PDRB tahun 2017 sampai dengan 2021 menurut pengeluaran dalam kurun waktu triwulanan, yang masing-masing disusun menurut jenis pengeluaran baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010. Komponen pengeluaran dalam penyusunan PDRB menurut pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, ekspor luar negeri, net ekspor antar daerah dan sebagai pengurang impor luar negeri.

Definisi dan metode penghitungan yang digunakan pada penghitungan PDRB triwulanan sama dengan konsep dan definisi yang digunakan pada penghitungan PDRB tahunan yang juga dipublikasikan oleh BPS Provinsi Jawa Timur setiap tahun. Adapun yang perlu diperhatikan dalam publikasi ini adalah hal hal yang merupakan spesifikasi triwulanan seperti di bawah ini:

1. Produk Domestik Regional Bruto triwulanan merupakan jumlah seluruh pengeluaran konsumsi, baik rumah tangga, lembaga non profit maupun pemerintah, ditambah dengan pengeluaran untuk pembentukan modal, perubahan inventori, barang dan jasa yang diekspor ke luar negeri serta net ekspor antar daerah, kemudian dikurangi dengan barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri.
2. Istilah “triwulanan” diartikan sebagai periode satu triwulan (tiga bulanan) yaitu triwulan I (Januari - Februari - Maret), triwulan II (April - Mei - Juni), triwulan III (Juli - Agustus-September) dan triwulan IV (Oktober - November - Desember).
3. Triwulan dasar yang digunakan adalah triwulan rata-rata dari triwulan I, II, III, dan IV tahun 2010.
4. Angka indeks yang disajikan dalam publikasi ini terdiri dari indeks perkembangan, indeks harga implisit, dan indeks laju pertumbuhan. Angka indeks perkembangan adalah angka yang diperoleh sebagai hasil bagi antara angka suatu triwulan tahun t dengan rata-rata dari triwulan I, II, III, dan IV tahun 2010. Angka indeks harga implisit merupakan hasil bagi antara angka PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan yang sama. Angka laju pertumbuhan yang disajikan dalam publikasi ini adalah laju pertumbuhan triwulanan berantai (q to q), laju pertumbuhan triwulanan terhadap triwulan yang sama tahun sebelumnya (y on y), dan laju pertumbuhan triwulanan kumulatif (c to c). Untuk memudahkan penulisan nilai PDRB masing-masing triwulanan dinotasikan dengan huruf seperti yang disajikan pada Tabel 1, dengan penghitungan persentase laju pertumbuhan sebagai berikut:
 - a. Persentase laju pertumbuhan triwulanan berantai (q to q) triwulan I, II, III, dan IV tahun t (triwulan sebelumnya = 100) adalah:
 - Triw. I : $(P/D) \times 100 - 100$
 - Triw. II : $(Q/P) \times 100 - 100$
 - Triw. III : $(R/Q) \times 100 - 100$
 - Triw. IV : $(S/R) \times 100 - 100$

b. Persentase laju pertumbuhan triwulanan terhadap triwulan yang sama tahun sebelumnya (*year on year*), triwulan I, II, III, dan IV tahun t (triwulan yang sama tahun sebelumnya = 100) adalah :

$$\text{Triw. I} : (P/A) \times 100 - 100$$

$$\text{Triw. II} : (Q/B) \times 100 - 100$$

$$\text{Triw. III} : (R/C) \times 100 - 100$$

$$\text{Triw. IV} : (S/D) \times 100 - 100$$

c. Laju pertumbuhan triwulanan kumulatif (*catch to catch*) triwulan I, I s.d II, I s.d III, dan I s.d IV tahun t (kumulatif triwulan tahun sebelumnya = 100) adalah :

$$\text{Triw. I} : (P/A) \times 100 - 100$$

$$\text{Triw. I s.d II} : ((P+Q)/(A+B)) \times 100 - 100$$

$$\text{Triw. I s.d III} : ((P+Q+R)/(A+B+C)) \times 100 - 100$$

$$\text{Triw. I s.d IV} : (T/E) \times 100 - 100$$

Notasi Penghitungan Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan

Uraian	Tahun t-1					Tahun t				
	I	II	III	IV	Jumlah	I	II	III	IV	Jumlah
Nilai	A	B	C	D	E	P	Q	R	S	T

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Manfaat data PDRB adalah sebagai salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah dan menelaah kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor. Data PDRB juga menunjukkan distribusi hasil pembangunan ekonomi untuk memenuhi permintaan domestik berupa konsumsi, investasi dan permintaan luar negeri.

Sedangkan penyusunan PDRB menurut pengeluaran triwulanan dimaksudkan untuk menyajikan data PDRB menurut pengeluaran yang dapat menginformasikan keadaan perekonomian Provinsi Jawa Timur dalam periode waktu yang lebih singkat bukan tahunan tapi triwulanan, dimana faktor musiman, tren dan siklus dapat tergambar pada periode waktu tersebut. Di samping itu, perlunya penyusunan PDRB triwulanan menurut pengeluaran dilakukan karena melihat kenyataan bahwa variabel-variabel seperti produksi, harga, dan lainnya dapat berubah secara tajam dari satu triwulan ke triwulan lainnya. Hal ini mengakibatkan angka PDRB triwulanan menjadi hal yang diperlukan dalam mengevaluasi kinerja perekonomian yang dapat disandingkan dengan variabel-variabel triwulanan yang lain dalam suatu model ekonomi makro, terutama perubahan-perubahan jangka pendek.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Publikasi ini mencakup tiga bagian, yaitu:

- Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- Bab II merupakan bagian yang menjelaskan ruang lingkup dan sumber data masing-masing sektor yang tercakup dalam sektor ekonomi.
- Bab III merupakan analisis data PDRB triwulanan tahun 2017 sampai dengan 2021.

BAB II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

Uraian komponen pengeluaran yang disajikan dalam bab ini mencakup konsep dan definisi, cakupan, sumber data dan cara-cara perhitungan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 dari masing-masing komponen pengeluaran.

2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besaran sumbangan nilai konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

2.1.1. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

2.1.2. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi, adalah:

- a. makanan dan minuman baik bahan maupun makanan jadi, termasuk minuman beralkohol, rokok, dan tembakau;

- b. perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa/kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
- c. bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala;
- d. barang tahan lama seperti mobil, meubeler, perabot dapur, TV, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan, dan tanaman hias;
- e. barang lain, seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo, dsj.), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik, dsj.), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar;
- f. jasa-jasa, seperti kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi, dsj.), pendidikan (biaya sekolah, kursus, dsj.), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, dan ongkos pembantu rumah tangga;
- g. barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- h. pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- i. barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen luar wilayah atau luar negeri termasuk dalam konsumsi rumah tangga dan diperlakukan sebagai impor. Sedangkan pembelian langsung oleh non-residen diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut (UN, 1993).

Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah. Pengeluaran untuk keperluan

transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2.1.3. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- b. Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT), dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu dan tiga bulanan untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan dan tiga bulanan untuk kelompok bukan makanan,
- c. Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- d. Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- e. Indeks Harga Konsumen (IHK)

2.1.4. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP,
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-adjust;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

2.2.1. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- a. LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- b. pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;

- c. setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- d. kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- e. istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

2.2.2. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

2.2.3. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPRRT adalah :

- a. Hasil Survei Khusus Lembaga Non-Profit (SK-LNP).

Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.

b. Hasil *updating* direktori LNPRT.

Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

d. Indeks Harga Konsumen (IHK)

2.2.4. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, = 1, 2, 3, ..., 7

j : jenis pengeluaran LNPRT = 1, 2, 3, ..., 19

b. Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara *men-deflate* PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

2.3.1. Konsep dan definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

2.3.2. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

2.3.3. Sumber data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2.3.4. Metode penghitungan

a. PK-P Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku (adh Berlaku)

Secara umum, PK-P atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi Atas Dasar Harga Konstan (adh Konstan)

Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDRB Menurut

Pengeluaran, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

2.4.1. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

2.4.2. Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;

2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

2.4.3. Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS provinsi/kabupaten/kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2.4.4. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai

pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “ *supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “ *deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang

modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-deflate PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*inflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkut dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-deflate PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*.

Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio pengeluaran output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (Lag) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5. PERUBAHAN INVENTORI

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDRB menurut pengeluaran, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

2.5.1. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi

barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

2.5.2. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;

- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2.5.3. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- a. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- b. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- c. Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- d. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- e. Data komoditas perkebunan;
- f. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- g. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- h. Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2.5.4. Metode penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- b. menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- c. menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan meng-inflate perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- a. Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- b. Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- c. Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- d. Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. EKSPOR IMPOR

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan jaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

2.6.1. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

2.6.2. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

2.6.3. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2.6.4. Metode penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

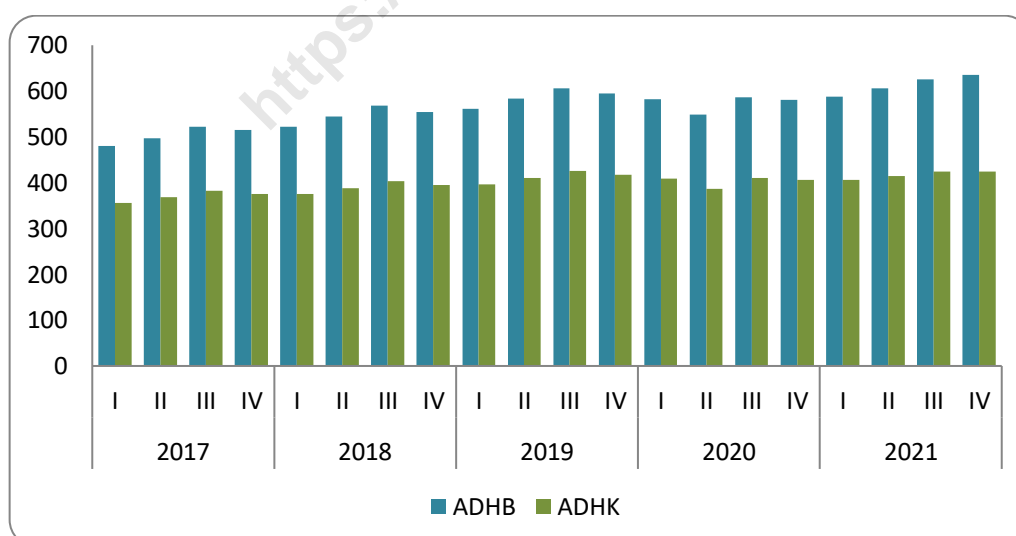
BAB III. PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULANAN

3.1. PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULANAN TAHUN 2017-2021

Setiap daerah pasti mempunyai pendapatan sendiri, dan biasanya berasal dari proses transaksi yang terjadi di wilayah tersebut. Terjadinya proses transaksi ini bisa dikatakan sebagai salah satu indikator ekonomi, yang bisa digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi.

Salah satu sumber utama terbentuknya nilai PDRB adalah dari hasil nilai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat di dalam suatu wilayah. Transaksi yang dihitung merupakan transaksi yang terjadi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah dilakukan oleh masyarakat (residen) atau masyarakat lain (non-residen).

Gambar 1
PDRB Triwulanan Menurut Pengeluaran
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan (2010=100) Tahun 2017-2021
(triliun rupiah)



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jatim

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB bisa juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tahun tertentu umumnya dalam jangka waktu satu tahun.

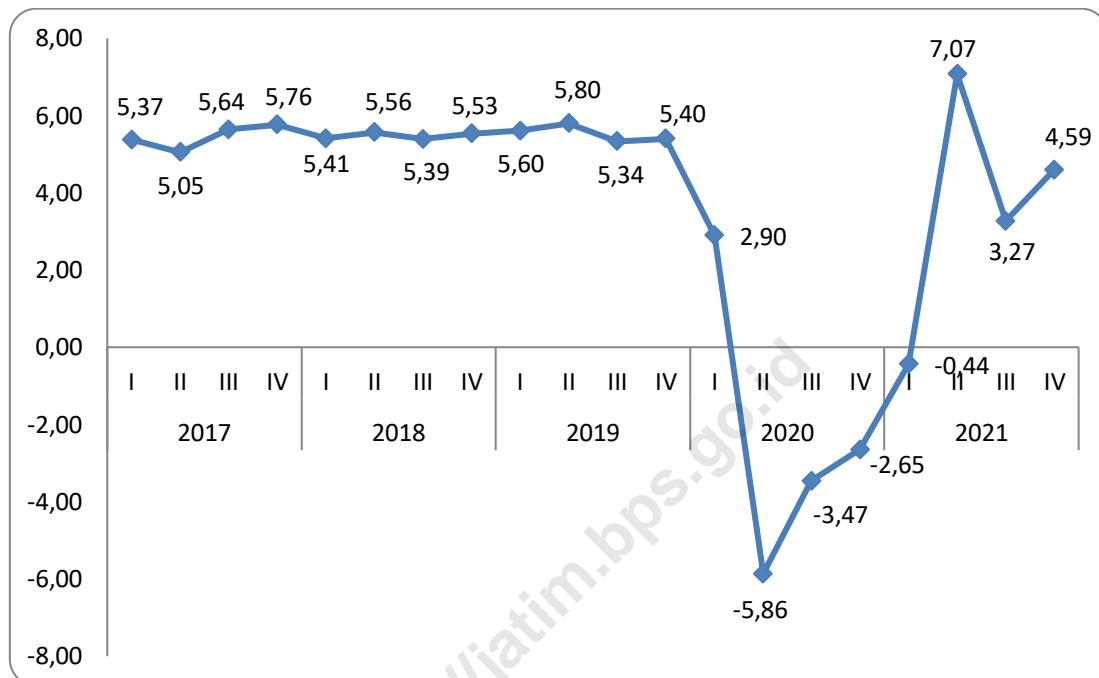
PDRB menurut komponen pengeluaran menunjukkan alokasi penggunaan produk barang dan jasa oleh konsumen akhir. Besaran nilai PDRB pengeluaran merupakan sirkulasi arus barang dan jasa yang telah diproduksi oleh masing-masing sektor ekonomi untuk dikonsumsi oleh seluruh komponen pengeluaran. PDRB menurut pengeluaran terdiri dari beberapa komponen, yaitu pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor luar negeri dan impor luar negeri serta net ekspor antar wilayah. Secara total nilai PDRB pengeluaran akan sama dengan nilai PDRB sektoral baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, artinya semua produk barang dan jasa yang dihasilkan akan terbagi habis dengan komponen pengeluaran.

Sepanjang tahun 2017 - 2021, besarnya PDRB baik ADHB maupun ADHK cenderung mengalami peningkatan. Kendati, pada triwulan II 2020, PDRB Jawa Timur baik ADHB maupun ADHK sedikit mengalami penurunan akibat efek pandemi Covid-19 yang muncul pada pertengahan Maret 2020. Pada triwulan III PDRB Jawa Timur mengalami peningkatan, namun kembali turun pada triwulan IV akibat adanya pembatasan aktivitas masyarakat. Pada tahun 2021 baik PDRB ADHB maupun ADHK mulai pulih kembali pasca pelonggaran sejumlah aktivitas ekonomi yang diputuskan oleh pemerintah pusat dan daerah. Walaupun pada tahun 2021 sempat terjadi ledakan gelombang kedua Covid-19 namun perekonomian di Jawa Timur tetap menunjukkan geliatnya. Hal ini terlihat pada Gambar 1 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2021, dari triwulan I hingga triwulan IV angka PDRB mengalami peningkatan.

Pada tahun 2021, PDRB ADHB Jawa Timur adalah sebesar 2.454,50 triliun. Dengan rincian, pada triwulan I 2021, PDRB ADHB Jawa Timur sebesar 588,49 triliun, triwulan II naik menjadi 605,51 triliun, meningkat lagi pada triwulan III menjadi 625,63 triliun, dan kembali meningkat di triwulan IV menjadi 634,87 triliun. Sementara itu PDRB ADHK selama empat triwulan di 2021 adalah sebesar 1.669,12 triliun dengan rincian di triwulan I sebesar 406,51 triliun, kemudian meningkat pada

triwulan II menjadi 414,27 triliun, meningkat kembali di triwulan III menjadi 423,87 triliun, dan menjadi 424,46 triliun triwulan IV.

Gambar 2
Laju Pertumbuhan y-on-y Triwulanan
Tahun 2017-2021
(persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jatim

Laju pertumbuhan ekonomi secara *y-on-y* menjelaskan perbandingan suatu angka pada dua waktu yang sama di periode berbeda dalam basis satu tahun. Basis masa setahun diawali dengan bulan Januari hingga akhir Desember pada tahun yang sama. Laju pertumbuhan ini diturunkan dari hasil perhitungan PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstan.

Sepanjang tahun 2017-2019 dari triwulan I sampai dengan IV, secara umum menunjukkan pola pertumbuhan ekonomi *y-on-y* Jawa Timur menurut pengeluaran yang cukup stabil yaitu berada pada sekitar angka 5 persen. Indikator ini menunjukkan adanya perubahan kuantum dari sisi konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPR, konsumsi pemerintah, pembentukan modal serta ekspor dan impor. Pergerakan ini biasanya dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang bersifat umum maupun bersifat khusus atau momen-momen yang terjadi, sehingga berdampak pada masing masing komponen ekonomi.

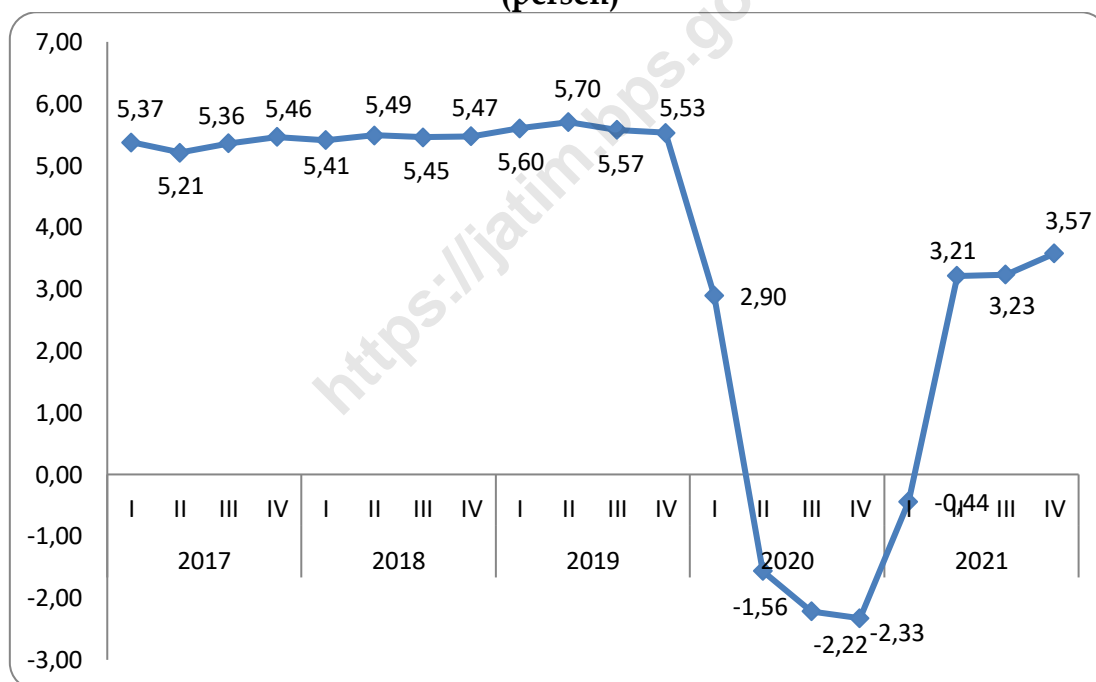
Sebagai contoh, pada tahun 2019 ada pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR/DPRD pada tanggal 17 April 2019 sehingga mempengaruhi pengeluaran pada organisasi politik peserta pemilu, termasuk pada momentum Pemilihan Kepala Daerah di sejumlah wilayah di Jawa Timur akhir 2020. Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan mempengaruhi kenaikan harga barang-barang sehingga berakibat komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga dan lembaga non profit yang melayani rumah tangga berkurang. Bencana alam yang terjadi akan meningkatkan komponen pengeluaran pemerintah dengan meningkatnya biaya sosial. Demikian juga bila terjadi kebijakan ekspor impor luar negeri secara tidak langsung akan berdampak pada penerimaan ekspor impor luar negeri, dimana adanya pembatasan impor khususnya barang akan berdampak pada menurunnya nilai impor luar negeri.

Sementara itu pada tahun 2020 hingga 2021, dari triwulan I hingga triwulan IV, angka pertumbuhan *y-on-y* Jawa Timur cukup fluktuatif. Pada triwulan I 2020, pertumbuhan mulai melambat menjadi 2,90 persen, hal ini sebagai imbas munculnya virus Covid-19 pada bulan Maret 2020 yang cukup menggoncang perekonomian. Pada triwulan II 2020 hampir semua aktivitas konsumsi terhambat akibat merebaknya virus Covid-19 sehingga membuat turbulensi ekonomi dari sisi pengeluaran berkontraksi cukup dalam mencapai 5,86 persen dibanding triwulan II 2019. Untuk triwulan selanjutnya kondisi ekonomi mulai membaik walaupun masih berkontraksi. Hingga puncaknya pada triwulan II 2021, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara *y-on-y* tumbuh positif sebesar 7,07 persen. Pada triwulan III 2021 pertumbuhan ekonomi melambat akibat adanya gelombang ketiga Covid-19 yang kembali naik. Untuk pola laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran selain itu bisa dikatakan berjalan normal karena pengaruh konsumsi rumah tangga, lembaga non profit yang melayani rumah tangga dan pemerintah pada momen-momen tertentu seperti hari raya keagamaan, bulan Ramadhan, lebaran, liburan anak sekolah yang jatuh pada bulan Juni-Juli, pengeluaran pemerintah pada waktu pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya atau gaji ke-14.

Pertumbuhan ekonomi secara kumulatif (*c-to-c*) hampir sama dengan pertumbuhan secara *y-on-y*, yaitu membandingkan dua angka dalam periode bulan yang sama di masa

yang berbeda. Perekonomian secara *c-to-c* ini juga mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pertumbuhan secara kumulatif ini dipengaruhi faktor-faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal diantaranya belum membaiknya perekonomian global, kenaikan harga minyak dunia dan masih terjadinya perang dagang antara Amerika-Tiongkok yang berpotensi terus memberi tekanan pada pertumbuhan ekonomi, selain itu terdapat dampak adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Dari sisi internal, potensi risiko terutama berasal dari pengetatan kebijakan moneter, kenaikan upah minimum, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), naik turunnya konsumsi masyarakat selama masa-masa tertentu seperti masa liburan sekolah, tahun ajaran baru, puasa dan perayaan hari raya. disamping itu juga dipengaruhi oleh konsumsi pemerintah dan lembaga-lembaga nirlaba.

Gambar 3
Laju Pertumbuhan *c-to-c* Triwulanan
Tahun 2017-2021
(persen)



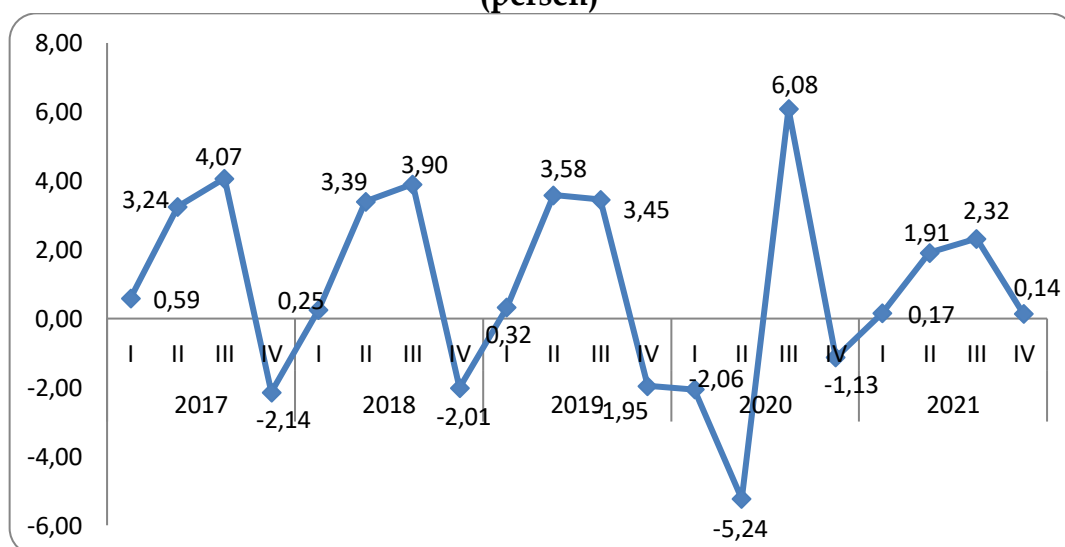
Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jatim

Pertumbuhan PDRB secara (*q-to-q*) menjelaskan perbandingan ukuran dua waktu yang sama dalam periode berbeda dalam basis satu kuartal. Satu kuartal adalah periode 3 bulanan. Siklus pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran berbeda di tiap kuartalnya, sebagai contoh siklus di kuartal III lebih tinggi dari kuartal IV. Dikarenakan triwulan III lima tahun terakhir sangat dipengaruhi konsumsi pada bulan Ramadhan, lebaran, dan hari raya haji.

Pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran (*q-to-q*) mengalami kontraksi pada triwulan IV, selama periode 2017-2020, yaitu masing-masing sebesar 2,14 persen (2017); 2,01 persen (2018); 1,95 persen (2019) dan 1,13 persen (2020). Selama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menurut *q-to-q* cukup fluktuatif. Pada triwulan I, kontraksi sebesar 2,06 dipengaruhi oleh faktor musiman, sedangkan pada triwulan II, kontraksi laju pertumbuhan justru semakin dalam mencapai 5,24 persen akibat mulai berdampak pandemi Covid-19 pada seluruh aspek ekonomi dan sosial. Namun, kondisi tersebut perlahan membaik pada triwulan III, di mana pemerintah telah melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, karena dampak pandemi Covid-19 yang rupanya mencapai puncak pada akhir tahun 2020, pemerintah kemudian memberlakukan kebijakan baru, yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mikro (PPKM). Oleh karena itu, pada triwulan IV 2020, laju pertumbuhan kembali mengalami kontraksi sebesar 1,13 persen.

Kondisi yang cukup baik terjadi pada tahun 2021, dimana seluruh triwulan mengalami tumbuh positif walaupun pada triwulan 4 kembali melambat. Kondisi ini terjadi mengingat semakin longgarnya kebijakan dan adanya kewajiban vaksin Covid-19 bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menurunkan jumlah penderita dan akibat buruk dari Covid-19.

Gambar 4
Laju Pertumbuhan q-to-q Triwulanan
Tahun 2017-2021
(persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jatim

Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga

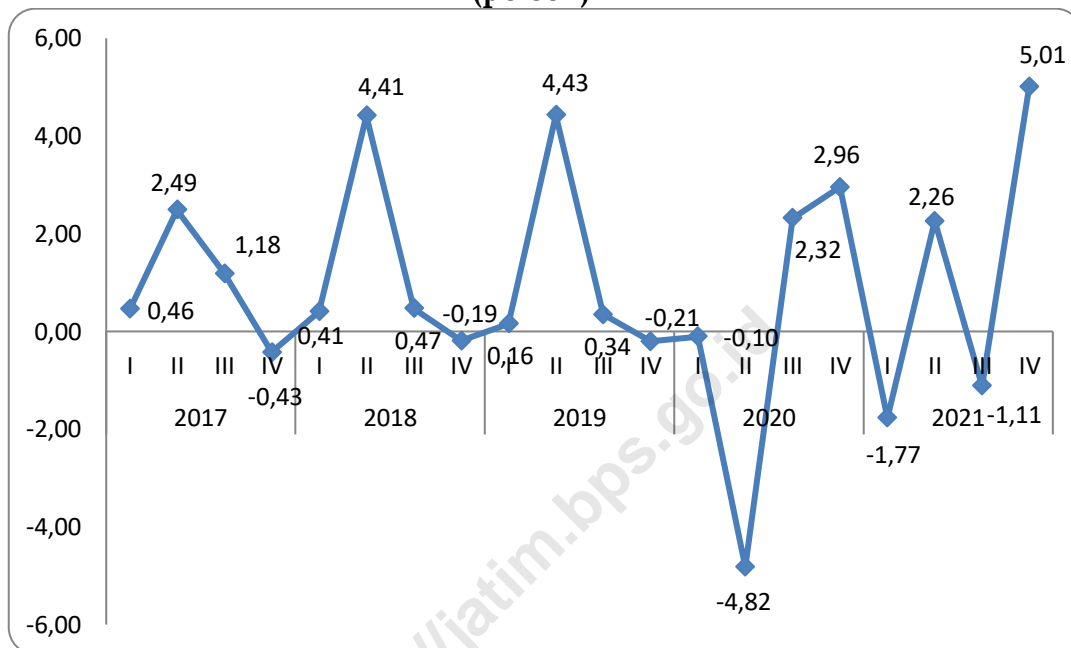
Pola konsumsi dapat dikatakan sebagai suatu kondisi kecenderungan terhadap pengeluaran keluarga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dengan pertimbangan terhadap lingkungan dan kehidupan kebudayaan masyarakat. Pola konsumsi dijadikan sebagai standar hidup seseorang. Dimana standar hidup itu berupa ukuran taraf hidup yang layak dan wajar atau pantas seperti selayaknya kehidupan orang lain. Taraf hidup yang harus dipenuhi adalah dengan memenuhi segala kebutuhan baik berupa barang maupun jasa. Sektor jasa berkembang semakin penting karena di samping kebutuhan-kebutuhan dasar untuk makanan, kebutuhan akan kesehatan, rekreasi dan pendidikan juga sangat diperlukan oleh masyarakat dan menuntut bagian yang lebih dari anggaran keluarga.

Pola konsumsi akhir rumah tangga masih tergolong tinggi pada triwulan II selama tahun 2017 hingga 2021. Hanya saja, dampak pandemi Covid-19 pada triwulan II 2020 menyebabkan sejumlah lapangan usaha terhambat bahkan tutup sehingga menyebabkan persediaan (*supply*) pasar berkurang. Di satu sisi, jumlah permintaan (*demand*) juga menurun drastis akibat mulai diterapkannya kebijakan PSBB oleh pemerintah. Situasi ini otomatis memberi *stressing* besar sekaligus *economic shock* dan mengakibatkan laju pertumbuhan konsumsi akhir di tingkat rumah tangga berkontraksi dalam mencapai 4,82 persen.

Pola pengeluaran konsumsi rumah tangga seketika berubah sepanjang triwulan I 2020 hingga triwulan IV 2021, dimana pada triwulan-triwulan tersebut pertumbuhannya cukup fluktuatif dan berbeda dengan pola sebelum 2020 yang cenderung sama polanya. Apalagi, kondisi pada triwulan II terdapat momentum puasa dan hari raya keagamaan, secara normal, momen tersebut menunjukkan peningkatan konsumsi yang signifikan di berbagai bidang, terutama konsumsi akhir rumah tangga. Situasi ekonomi yang berubah drastis pada triwulan II 2020 dibandingkan triwulan yang sama tahun 2017-2019 juga sedikit menggeser pola triwulanan. Pada triwulan II tahun 2021 polanya hampir sama dengan kondisi sebelum pandemi namun pertumbuhannya cenderung melambat. Pada triwulan III 2021 seperti pola pada tahun 2017-2019, dimana mengalami penurunan

pertumbuhan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, hanya saja untuk triwulan III 2021 tersebut mengalami kontraksi mencapai 1,11 persen.

Gambar 5
Laju Pertumbuhan q-to-q Triwulanan
Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2017-2021
(persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jatim

Komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mempunyai kontribusi atau peranan tertinggi terhadap pembentukan PDRB menurut pengeluaran. Jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat Jawa Timur menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan konsumsi. Daya beli masyarakat Jawa Timur yang relatif stabil kecuali selama tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19, pada keadaan tertentu misal pada waktu hari raya idul fitri, natal dan tahun baru serta musim liburan sekolah dan tahun ajaran baru mendorong tingginya pertumbuhan konsumsi akhir rumah tangga dari tahun ke tahun.

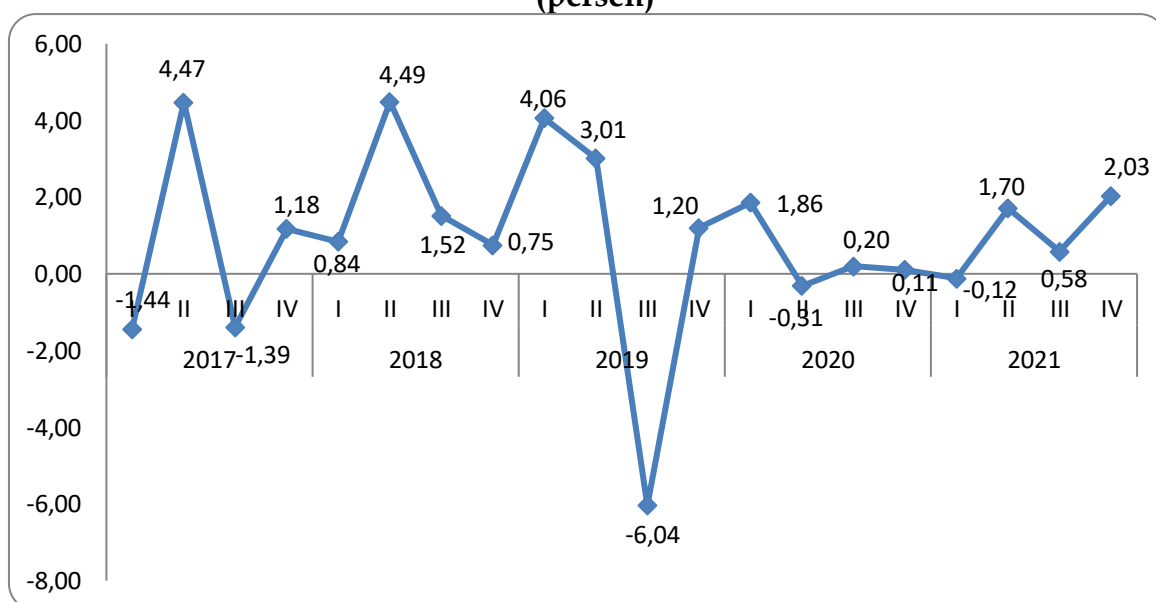
Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah tangga (LNPRT)

Pengeluaran konsumsi akhir dari lembaga non profit adalah biaya yang dikeluarkan oleh lembaga untuk melakukan pelayanan. Pelayanan kepada masyarakat seperti pada momen-momen bulan Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha,

Natal dan tahun baru, kegiatan sosial dan politik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga. Secara normal, situasi tersebut relevan pada triwulan I sampai triwulan III selama tahun 2017 hingga 2018, pola pertumbuhan q to q pengeluaran LNPRT cenderung berpola sama, namun pada tahun 2019 hingga 2021 cukup bervariasi polanya. Sementara pada triwulan II tahun 2020 di mana pandemi Covid-19 yang menerpa Jawa Timur mengakibatkan sejumlah dinamisme kinerja Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT). Hal tersebut berlanjut hingga tahun 2021. Kendati pada akhir tahun 2020, terdapat momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tetapi masih terjadi sejumlah pembatasan sosial (*physical distancing*). Hal ini yang membuat perubahan konsumsi yang terjadi pada lembaga swasta nirlaba tertekan bahkan berkontraksi.

Pada tahun 2021 kondisi pengeluaran LNPRT di Jawa Timur semakin membaik, terlihat pada gambar 6, bahwa hampir seluruh triwulan pada tahun 2021 mengalami tumbuh positif, kecuali pada triwulan I 2021 yang terjadi beberapa bencana namun pengeluarannya tidak sebanding pada triwulan 4 2020 yang terdapat Pilkada di 19 kabupaten/kota.

Gambar 6
Laju Pertumbuhan q-to-q Triwulanan
Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah tangga
Tahun 2017-2021
(persen)



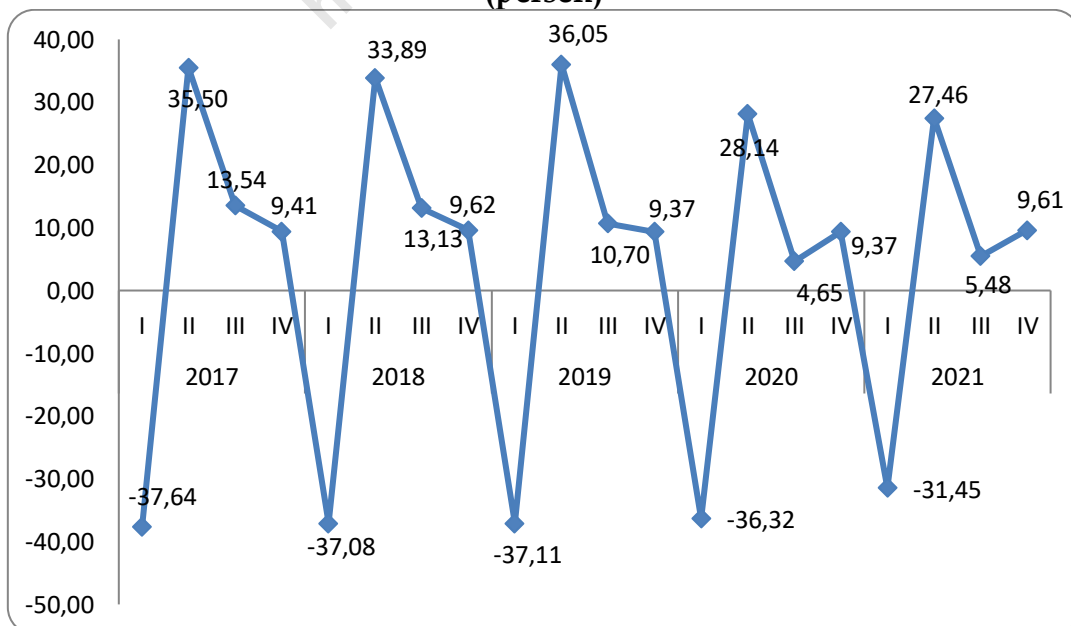
Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jatim

Biasanya, kontribusi pengeluaran akhir konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga terhadap total PDRB Jawa Timur dari tahun ke tahun selalu paling rendah dibanding komponen lain. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, pandemi Covid-19 menyebabkan tinggi aktivitas kegiatan sosial dan masyarakat untuk berperan aktif menanggulangi penyebaran virus Covid-19 sekaligus penggalangan sejumlah dana termasuk hibah bagi penyintas Covid-19. Inilah yang mengakibatkan porsi konsumsi LNPRT terhadap kue PDRB pengeluaran secara umum mengalami peningkatan.

Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

Konsumsi (belanja) pemerintah merupakan pembelian barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian dan bukan pembayaran transfer uang yang dikumpulkan dari pajak satu kelompok di dalam masyarakat. Konsumsi pemerintah terdiri dari belanja pegawai negeri, belanja barang dan jasa, bantuan sosial dan penyediaan sarana publik.

Gambar 7
Laju Pertumbuhan *q-to-q* Triwulanan
Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Tahun 2017-2021
(persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jatim

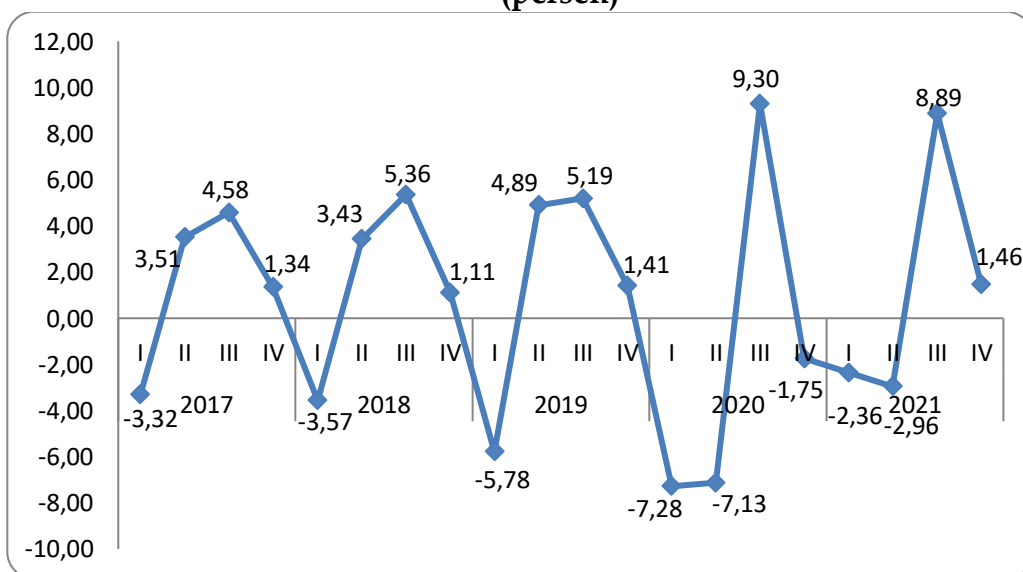
Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah mempunyai siklus pola yang tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Konsumsi pemerintah dalam kurun waktu 2017 - 2021 cenderung membentuk pola *U-shape* terbalik, dimana pada triwulan I pertumbuhannya cenderung melambat atau negatif, hal ini dimungkinkan pada awal tahun anggaran belum banyak terserap, triwulan II dan III mulai dilakukan penyerapan anggaran sehingga kinerjanya cenderung meningkat. Pada triwulan IV biasanya terjadi peningkatan penyerapan yang cukup tinggi karena menjelang tutup tahun anggaran. Namun, selama tahun 2020 hingga tahun 2021, pengeluaran konsumsi pemerintah cenderung stagnan akibat adanya pandemi Covid-19. Kondisi ini menyebabkan daya serap anggaran pemerintah lebih lambat dan sejumlah pengadaan terhenti untuk *refocusing* anggaran untuk penanggulangan pandemi.

Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori

Komponen keempat yaitu pembentukan modal tetap bruto, adalah semua barang modal baru yang digunakan/dipakai sebagai alat untuk memproduksi. Barang-barang modal tersebut dapat diperoleh dengan cara membeli dari luar daerah ataupun dari pengadaan di daerah itu sendiri. Barang modal baru termasuk pembelian barang modal bekas dari luar daerah. Yang dikategorikan ke dalam barang modal adalah barang yang mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih, dan yang dimaksud dengan pemakaian adalah penggunaan barang-barang modal tersebut sebagai alat yang tetap dalam memproduksi. Diharapkan komponen ini terus meningkat sesuai dengan program pemerintah sekarang dengan menggalakkan peningkatan infrastruktur. Konteks ini disamakan dengan investasi fisik, dengan asumsi, semakin besar PMTB maka semakin besar pula output suatu wilayah, dan semakin besar pula penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut (*ceteris paribus*). Contoh jika investasi suatu perusahaan dengan membeli mesin-mesin baru, maka perusahaan tersebut dipastikan akan memerlukan tenaga operator mesin yang ahli untuk mengoperasikannya. Jadi bisa dibayangkan jika investasi berasal dari pembangunan perusahaan-perusahaan baru, tentunya juga akan menyerap banyak tenaga kerja.

Barang-barang yang tidak diproduksi kembali seperti tanah, cadangan mineral tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto, akan tetapi pengeluaran untuk meningkatkan penggunaan tanah seperti pembukaan hutan untuk dijadikan areal perkebunan, daerah pemukiman, bendungan dan lain-lain serta pengeluaran untuk perluasan areal pertambangan semuanya merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto. Pengeluaran untuk perbaikan barang-barang modal yang mengakibatkan bertambah panjangnya umur pemakaian atau menambah kapasitas produksi dari barang-barang modal tersebut juga merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto. Jadi semua pengeluaran yang bersifat rutin seperti pembelian barang-barang yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi tidak termasuk dalam kategori pembentukan modal tetap bruto, dan penjualan neto dari barang-barang modal bekas dan barang-barang modal afkiran di dalam daerah tersebut juga tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto karena barang-barang tersebut sudah dihitung sebagai barang modal pada waktu pertama kali dibeli. Lain halnya barang-barang modal bekas yang dibeli dari luar daerah akan merupakan pembentukan modal tetap bruto, karena di dalam daerah yang sekarang barang-barang tersebut belum pernah dihitung.

Gambar 8
Laju Pertumbuhan *q-to-q* Triwulanan
Pembentukan Modal Tetap Bruto
Tahun 2017-2021
(persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jatim

Pembentukan modal atau lebih dikenal dengan kata investasi dalam PDRB menurut pengeluaran adalah gabungan antara komponen pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori. Jika barang dalam bentuk fisik yang dihasilkan oleh sektor produksi tidak habis untuk konsumsi dan akan digunakan untuk lainnya, maka barang sisa tersebut menjadi inventori atau barang cadangan untuk tahun berikutnya, demikian sebaliknya.

Dari tahun 2017 – 2021 pembentukan modal tetap bruto tumbuh fluktuatif, hal ini berkaitan dengan pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta, BUMN maupun BUMD, pengadaan barang modal serta investasi lainnya. Seperti pola pengeluaran konsumsi pemerintah, untuk awal tahun atau triwulan I pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto belum banyak terserap. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, efek pandemi Covid-19 membuat iklim investasi di Jawa Timur meredup. Selama 2020 hingga 2021 tersebut, hanya pada triwulan III 2020, triwulan III 2021 dan triwulan IV 2021 saja yang menunjukkan kinerja PMTB yang positif, yakni masing-masing mencapai 9,30 persen, 8,89 persen, dan 1,46 persen, lainnya mengalami kontraksi hingga yang terdalam adalah pada triwulan I 2020 yaitu sebesar 7,28 persen.

Ekspor Luar Negeri

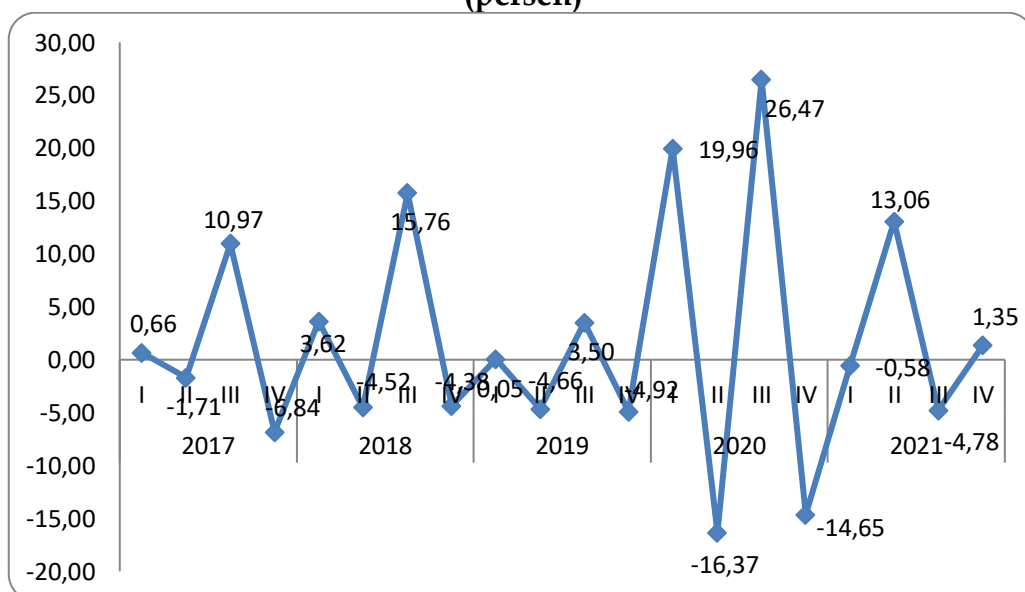
Ekspor luar negeri adalah transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, dimana barang dan jasa dalam negeri dibawa ke luar negeri. Transaksi tersebut meliputi ekspor barang, pengangkutan, komunikasi, jasa-jasa, asuransi dan berbagai jasa lainnya seperti jasa perdagangan yang diterima oleh pedagang daerah tersebut yang kegiatannya mengadakan transaksi barang di luar daerah tersebut. Juga termasuk di sini transaksi dari beberapa barang tertentu seperti barang dan jasa yang langsung dibeli di pasar domestik oleh bukan penduduk daerah tersebut. Penduduk suatu daerah terdiri dari badan pemerintah, perorangan, perusahaan dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.

Nilai ekspor luar negeri Jawa Timur juga cenderung berfluktuatif, terutama pada tahun 2020 hingga 2021. Masih berlangsungnya perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19, serta adanya perang

antara Rusia dan Ukraina membuat ekonomi Jawa Timur mengalami tekanan. Hal itu terlihat pada triwulan II dan IV 2020 serta triwulan III 2021, di mana pertumbuhan ekspor luar negeri Jawa Timur mengalami kontraksi yang cukup dalam. Kontraksi terdalam terjadi pada triwulan II 2020 yang mencapai 16,37 persen. Selain itu pada triwulan IV 2020 dan triwulan III 2021 terkontraksi masing-masing sebesar 14,65 persen dan 4,78 persen. Walaupun begitu, ekspor luar negeri Jawa Timur masih relatif tinggi, keadaan ini didukung karena Jawa Timur memiliki pelabuhan terbesar di kawasan wilayah Indonesia bagian timur. Beberapa komoditas ekspor Jawa Timur yang sampai saat ini masih unggul di antaranya perhiasan/permata; lemak dan minyak hewani/nabati; kayu, barang dari kayu; bahan kimia organik serta ikan dan udang.

Pola laju pertumbuhan ekspor luar negeri Jawa Timur terlihat cenderung sama pada tahun 2017 hingga 2019, yaitu meningkat pada triwulan III setiap tahunnya. Sedangkan pada triwulan I, II, dan IV, ada kecenderungan menurun. Namun pada tahun 2020 dan 2021, ekspor Jawa Timur polanya berbeda, akibat adanya pandemi Covid-19 dan diterapkannya kembali upaya pengetatan perdagangan sebagai antisipasi penyebaran virus Covid-19 di Jawa Timur.

Gambar 9
Laju Pertumbuhan *q-to-q* Triwulanan
Ekspor Luar Negeri Tahun 2017-2021
(persen)

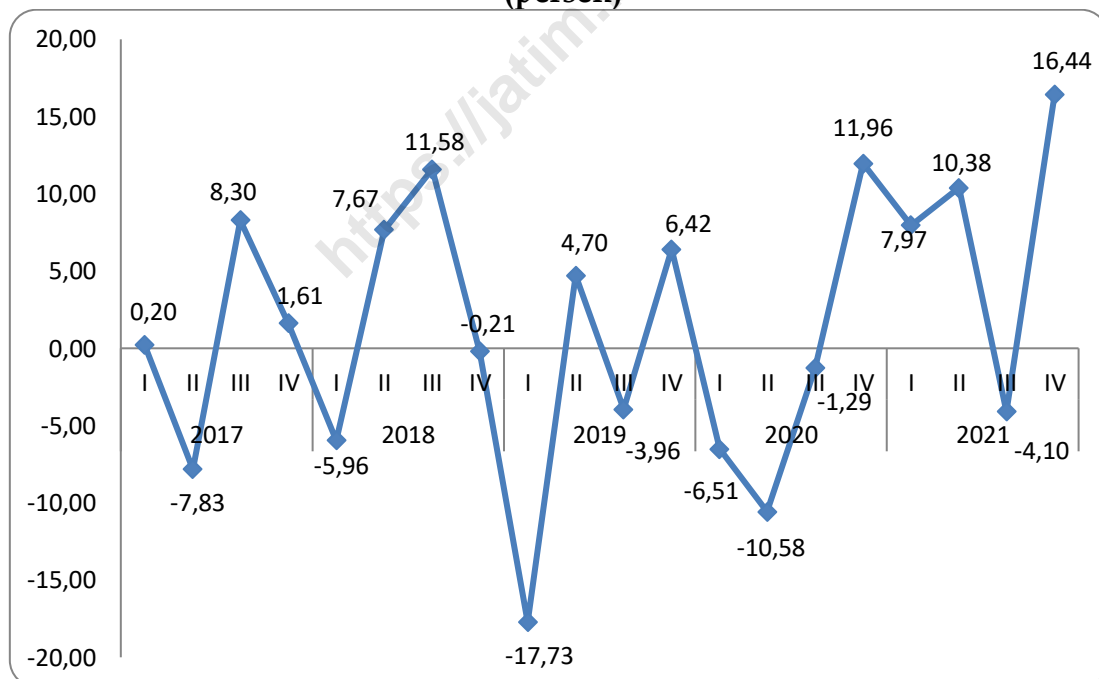


Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jatim

Impor Luar Negeri

Impor luar negeri adalah transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu daerah dengan penduduk daerah lain, termasuk dengan negara lain. Impor barang meliputi mesin-mesin, pengangkutan, komunikasi, dan berbagai jasa lainnya. Transaksi barang dan jasa yang dimaksud adalah semua barang dan jasa yang melintasi batas geografis suatu daerah atau negara. Pembelian kapal terbang dan kapal laut yang baru maupun yang bekas dari negara atau daerah lain merupakan impor barang. Barang-barang yang melintasi batas geografis suatu daerah, akan tetapi hanya merupakan tempat persinggahan saja dalam perjalanan menuju atau kembali ke suatu tempat, barang-barang untuk peragaan, barang-barang sebagai bahan penyelidikan, contoh barang-barang kepunyaan turis atau penumpang tidak termasuk di sini.

Gambar 10
Laju Pertumbuhan *q-to-q* Triwulanan
Impor Luar Negeri Tahun 2017-2021
(persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jatim

Impor luar negeri Jawa Timur nilainya juga tergolong tinggi, hampir seimbang jika dibandingkan dengan nilai eksportnya. Namun, akibat adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020, aktivitas impor luar negeri Jawa Timur banyak mengalami kontraksi. Jika di tahun-tahun sebelum 2020, terjadi kontraksi paling banyak 2 triwulan setiap

tahunnya, maka pada tahun 2020, justru kontraksi laju pertumbuhan impor luar negeri terjadi hingga 3 triwulan, yaitu triwulan I, II, dan III. Kemudian di tahun 2021, impor luar negeri Jawa Timur mulai membaik, seperti yang terlihat pada gambar 10 bahwa kontraksi terjadi hanya pada triwulan III, yaitu sebesar 4,10 persen. Baik ekspor maupun impor di Jawa Timur lebih didominasi perdagangan barang dan jasa antar negara. Kondisi ini menggambarkan bahwa Jawa Timur masih membutuhkan barang-barang dari luar negeri seperti untuk bahan baku sektor industri, mesin-mesin dan peralatan untuk industri. Yang menjadi andalan barang impor dari Jawa Timur antara lain mesin-mesin/pesawat mekanik; besi dan baja; plastik dan barang dari plastik; pupuk dan gandum-gandum.

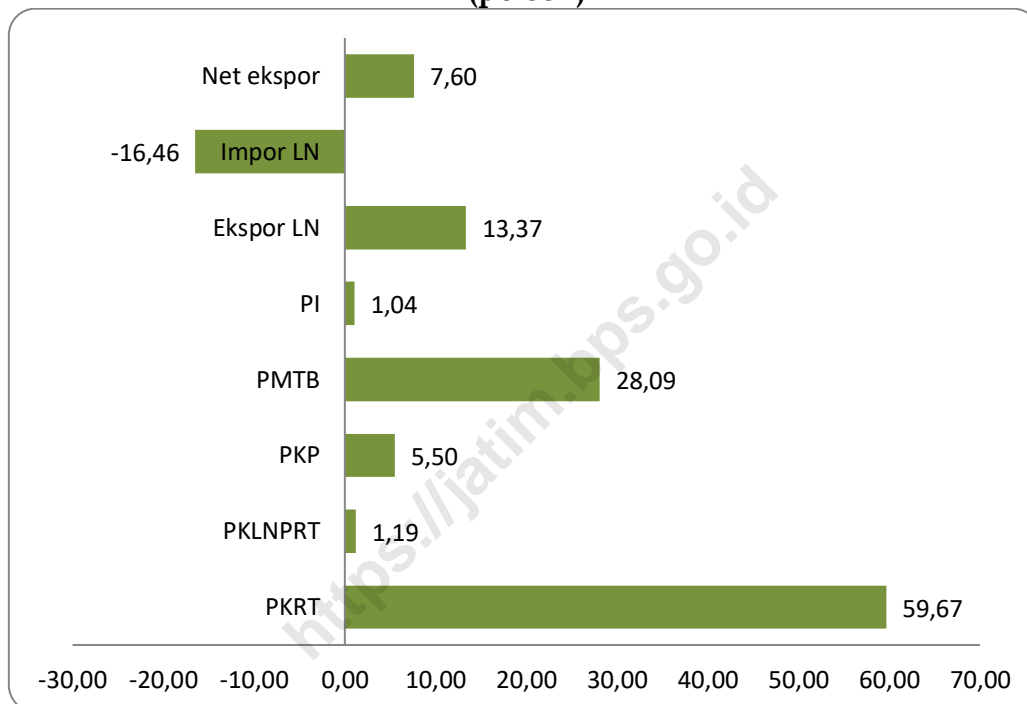
Net Ekspor Antar Daerah

Kegiatan ekspor dan impor antar wilayah atau antar pulau maupun provinsi dimasukkan dalam komponen net ekspor, dimana nilainya merupakan selisih antara ekspor antar wilayah dan impor antar wilayah. Nilai ekspor neto merupakan gambaran derajat ketergantungan perekonomian suatu wilayah terhadap wilayah lain. Apabila terjadi surplus, maka pendapatan yang masuk wilayah tersebut meningkat, dan tentunya itu memperbesar PDRB wilayah bersangkutan. Sebaliknya jika nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspornya maka terjadi defisit anggaran, karena tingkat ketergantungan terhadap wilayah lain menjadi lebih tinggi.

Net Ekspor Jawa Timur masih tinggi karena tingkat ketergantungan provinsi lain khususnya di wilayah Indonesia bagian barat, timur serta beberapa provinsi lainnya masih tergolong tinggi, terutama terkait dengan produk-produk barang pertanian dan industri. Dari tahun 2017-2021 posisi neraca perdagangan antar provinsi Jawa Timur berada dalam kondisi surplus, hal ini berkaitan erat dengan perputaran barang dan jasa di lingkup wilayah Jawa Timur tetap bertahan. Bahkan, di tengah pandemi Covid-19 yang menerpa sejak triwulan II 2020, tetapi jika dilihat berdasarkan *share* -nya terhadap ekonomi Jawa Timur, rata-ratanya selama tahun 2020 hingga tahun 2021 mencapai sebesar 6,74 persen.

Peranan masing-masing komponen pengeluaran yang dinyatakan dalam rasio/persentase menunjukkan besarnya komponen penggunaan akhir PDRB. Peran yang menggambarkan bagian dari PDRB yang digunakan untuk konsumsi akhir, seperti konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor dan impor.

Gambar 11
Rata-Rata Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran
Tahun 2017-2021
(persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jatim

Peranan atau struktur ekonomi, selama kurun waktu 2017-2021 di setiap triwulan, rata-rata komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mempunyai kontribusi sangat besar yaitu sebesar 59,67 persen; konsumsi akhir lembaga non profit sebesar 1,19 persen; konsumsi akhir pemerintah sebesar 5,50 persen; pembentukan modal tetap bruto sebesar 28,09 persen; perubahan inventori sebesar 1,04 persen; ekspor luar negeri sebesar 13,37 persen; impor luar negeri yang merupakan sebagai pengurang sebesar 16,46 persen; dan net ekspor antar daerah sebesar 7,60 persen.

3.2. PEREKONOMIAN JAWA TIMUR TRIWULANAN TAHUN 2021

3.2.1. PEREKONOMIAN JAWA TIMUR TRIWULAN I-2021

Ekonomi Jawa Timur pada triwulan I-2021 berkontraksi 0,44 persen jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2020 (*y-on-y*). Pada triwulan I-2021, sebagian besar komponen pengeluaran masih mengalami tekanan Pandemi Covid-19 yang belum usai. Beberapa komponen pengeluaran yang mengalami kontraksi pertumbuhan adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, PMTB, dan ekspor luar negeri.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2021 berkontraksi 1,51 persen jika dibandingkan triwulan yang sama tahun 2020 (*y-on-y*). Kontraksi pertumbuhan tersebut tidak lepas dari dampak pandemi terhadap pola konsumsi dan ruang gerak masyarakat. Kebijakan PPKM yang kembali dilaksanakan mulai awal Januari 2021 dan dilanjutkan dengan PPKM Mikro pada bulan Februari 2021 yang membatasi mobilitas penduduk, berhasil menekan angka persebaran Covid-19, sehingga sampai dengan akhir Maret 2021 sudah tidak ada kabupaten/kota dengan status resiko tinggi dan perlahan menuju ke status resiko rendah. Selama bulan Januari hingga Maret, beberapa tempat wisata masih memberlakukan pembatasan jumlah pengunjung dan bahkan sebagian hingga menutup usahanya. Kondisi ini memberikan dampak signifikan terhadap subkomponen transportasi yang berkontraksi 20,63 persen dan subkomponen rekreasi dan budaya berkontraksi 6,81 persen. Meskipun demikian, beberapa subkomponen pengeluaran lainnya masih mampu tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh subkomponen komunikasi sebesar 6,45 persen, diikuti oleh pengeluaran untuk kesehatan yang tumbuh 5,32 persen serta pengeluaran untuk barang pribadi dan jasa perorangan yang tumbuh 3,81 persen. Selama triwulan I-2021, sebagian besar kegiatan masyarakat masih dilakukan secara daring yang berdampak pada peningkatan penggunaan internet. Selain itu, kebutuhan masyarakat akan pemenuhan barang-barang kesehatan juga turut mendorong pengeluaran untuk kesehatan dan barang pribadi.

Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2020, pengeluaran konsumsi LNPRT pada triwulan I-2021 mengalami kontraksi 0,14 persen (*y-on-y*). Adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat pada triwulan I-2021 turut berdampak pada aktivitas kegiatan LNPRT. Perayaan hari raya acara keagamaan seperti Hari Raya Imlek, Nyepi, serta Isra Miraj juga dilakukan secara terbatas.

Sementara itu, pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh positif 0,53 persen (*y-on-y*) akibat pertumbuhan konsumsi individu yang mencapai 2,44 persen. Pada triwulan ini, realisasi belanja pegawai, belanja modal serta belanja sosial mengalami peningkatan jika dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu.

Pada triwulan I-2021, kondisi investasi masih tertekan dengan terkontraksinya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,63 persen (*y-on-y*). Tertekannya investasi disebabkan oleh laju pertumbuhan PMTB bangunan yang terkontraksi 1,79 persen dan PMTB non-bangunan yang terkontraksi 5,47 persen. Terkontraksinya PMTB pada triwulan ini sejalan dengan turunnya realisasi pengadaan semen, turunnya nilai impor barang modal, serta penurunan total realisasi investasi (penanaman modal) dibanding triwulan yang sama tahun lalu.

Ekspor luar negeri Jawa Timur pada triwulan I-2021 mengalami kontraksi sebesar 10,26 persen (*y-on-y*). Terkontraksinya ekspor luar negeri dipengaruhi oleh penurunan nilai ekspor beberapa komoditas utama dari Jawa Timur seperti perhiasan, lemak dan minyak hewan, bahan kimia, dan kertas. Ekspor jasa ke luar negeri juga mengalami kontraksi cukup dalam, salah satunya disebabkan oleh penurunan tajam jumlah wisman yang masuk melalui pintu Juanda jika dibandingkan triwulan pertama tahun lalu.

Di sisi lain, impor luar negeri tumbuh positif sebesar 6,71 persen (*y-on-y*) dikarenakan adanya peningkatan nilai impor barang baik migas maupun non migas. Komoditas non migas yang mengalami peningkatan impor dari luar negeri diantaranya pupuk, besi dan baja, ampas, dan bahan kimia organik.

Jika dicermati secara *q-to-q*, laju pertumbuhan Jawa Timur pada triwulan I-2021 mengalami pertumbuhan tipis sebesar 0,17 persen. Pada periode ini, sebagian besar komponen pengeluaran mengalami kontraksi pertumbuhan jika dibandingkan triwulan sebelumnya (*q-to-q*). Kontraksi pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang mencapai 31,45 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pada pengeluaran konsumsi rumah tangga dan PMTB yang masing-masing terkontraksi sebesar 1,77 persen dan 2,36 persen. Konsumsi LNPRT dan ekspor luar negeri juga terkontraksi tipis sebesar 0,12 persen dan 0,58 persen. Sementara itu, impor luar negeri yang berperan sebagai komponen pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran tumbuh positif sebesar 7,97 persen.

Ditinjau dari segi *share*-nya, pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen pengeluaran yang paling besar dalam menyumbang perekonomian Jawa Timur, yaitu mencapai 60,16 persen. Kemudian diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencapai 27,45 persen. Ekspor luar negeri memberikan kontribusi sebesar 13,10 persen. Di sisi lain, impor luar negeri yang berperan sebagai komponen pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran berkontribusi sebesar 15,58 persen. Sementara itu pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi LNPRT memberikan *share* masing-masing sebesar 4,37 persen dan 1,23 persen terhadap total PDRB Jawa Timur.

3.2.2. PEREKONOMIAN JAWA TIMUR TRIWULAN II-2021

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan II-2021 tumbuh signifikan sebesar 7,07 persen (*y-on-y*), dimana seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif. Pada triwulan ini terjadi peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang signifikan dibanding triwulan yang sama tahun lalu. Pemberlakuan kebijakan larangan mudik Lebaran selama tanggal 6-17 Mei 2021 tidak berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah penumpang pada berbagai moda transportasi jika dibandingkan kebijakan larangan mudik tahun lalu. Bahkan, jumlah penumpang cenderung meningkat pada periode sebelum dan sesudah masa larangan mudik meskipun telah diberlakukan aturan tambahan berupa pengetatan

perjalanan. Pada tingkat global, terjadi perbaikan perekonomian pada triwulan II-2021 dibandingkan periode sebelumnya. Situasi perbaikan ekonomi ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia yang tumbuh positif, seperti Amerika Serikat (12,2 persen), Tiongkok (7,9 persen), dan Singapura (15,8 persen). Perbaikan ini turut memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi Jawa Timur, sebagai salah satu kontributor ekonomi terbesar di Indonesia. Selain itu, rendahnya basis pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 (*low base effect*), turut memberikan dampak yang besar terhadap tingginya capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2021.

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami akselerasi pertumbuhan setelah terkontraksi pada triwulan sebelumnya. Pada kuartal kedua, komponen pengeluaran ini tumbuh 5,82 persen (*y-on-y*). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat yang signifikan selama momen Ramadan dan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dibandingkan kondisi tahun lalu. Seluruh subkomponen konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan positif, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada kelompok konsumsi transportasi (tumbuh 8,97 persen); perabot, peralatan rumah tangga dan pemeliharaan rutin rumah (8,70 persen); restoran dan hotel (7,23 persen); serta makanan dan minuman non beralkohol (6,24 persen).

Pada triwulan II-2021, komponen pengeluaran konsumsi LNPRT juga mengalami akselerasi dengan pertumbuhan mencapai 1,88 persen (*y-on-y*). Pertumbuhan komponen ini dipicu oleh peningkatan aktivitas LNPRT, khususnya pada lembaga keagamaan selama bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, serta perayaan hari keagamaan lainnya seperti Hari Raya Waisak dan Kenaikan Isa Almasih. Selain itu, adanya aktivitas partai politik turut mendorong peningkatan konsumsi pada komponen pengeluaran ini.

Kondisi serupa juga terlihat pada kondisi pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh positif sebesar 0,01 persen (*y-on-y*). Pertumbuhan ini dipicu oleh

peningkatan realisasi belanja APBD baik pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja bantuan sosial.

Pada triwulan II-2021, laju pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terakselerasi sebesar 1,75 persen (*y-on-y*). Akselerasi laju pertumbuhan PMTB terjadi pada subkomponen bangunan dan non bangunan yang tumbuh masing-masing sebesar 1,37 persen dan 3,13 persen, setelah mengalami kontraksi pada triwulan pertama tahun 2021. Akselerasi pertumbuhan PMTB didorong oleh peningkatan nilai tambah kategori konstruksi yang terlihat dari peningkatan realisasi volume pengadaan semen, peningkatan penjualan kendaraan untuk barang modal, serta peningkatan impor alat angkutan untuk industri.

Geliat perekonomian global pada triwulan II-2021 mendorong kinerja ekspor luar negeri Jawa Timur. Pada periode ini, ekspor luar negeri tumbuh signifikan sebesar 21,34 persen (*y-on-y*), peningkatan terjadi pada ekspor barang maupun jasa. Beberapa komoditas ekspor yang mengalami peningkatan adalah tembaga, kayu dan barang dari kayu, bahan kimia organik, dan kertas. Adanya peningkatan jumlah wisman yang masuk ke Juanda turut mendorong peningkatan ekspor ke luar negeri, terutama pada ekspor jasa.

Impor luar negeri pada kuartal kedua tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 31,72 persen (*y-on-y*). Peningkatan ini dikarenakan adanya kenaikan impor barang yang signifikan, baik komoditas migas maupun non migas. Beberapa komoditas non migas yang mengalami kenaikan adalah besi dan baja, ampas, pupuk, serta plastik dan barang dari plastik. Impor migas pada periode ini juga mengalami peningkatan. Selain itu, adanya peningkatan jumlah penumpang yang berangkat ke luar negeri dari Bandara Juanda mengindikasikan peningkatan impor luar negeri.

Apabila ditinjau dari sisi pertumbuhan *q-to-q*, PDRB Jawa Timur pada triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 1,91 persen. Pada kuartal ini, sebagian besar komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif jika dibandingkan triwulan sebelumnya (*q-to-q*). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen

pengeluaran konsumsi pemerintah yang mencapai 27,46 persen, diikuti oleh ekspor luar negeri yang tumbuh 13,06 persen, pengeluaran konsumsi rumah tangga (2,26 persen) dan pengeluaran konsumsi LNPR (1,70 persen). Komponen PMTB merupakan komponen yang mengalami kontraksi pertumbuhan pada periode ini, dengan kontraksi sebesar 2,96 persen. Di sisi lain, impor luar negeri sebagai komponen pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,38 persen.

Pada triwulan II-2021, terlihat bahwa *share* terbesar dalam menyumbang PDRB Jawa Timur masih tak jauh beda dengan triwulan I-2021. Dari sisi pengeluaran, pada kuartal kedua tahun 2021 ekonomi Jawa Timur didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai 60,00 persen dari total PDRB Jawa Timur. Kemudian diikuti oleh komponen PMTB yang memberikan kontribusi sebesar 25,97 persen. Ekspor luar negeri memberikan kontribusi sebesar 14,62 persen. Di sisi lain, impor luar negeri yang berperan sebagai komponen pengurang dalam PDRB pengeluaran berkontribusi sebesar 17,41 persen. Sementara itu komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi LNPR memberikan sumbangan masing-masing sebesar 5,43 persen dan 1,22 persen terhadap ekonomi Jawa Timur.

3.2.3 PEREKONOMIAN JAWA TIMUR TRIWULAN III-2021

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III-2021 tumbuh sebesar 3,27 persen jika dibandingkan triwulan yang sama pada tahun 2020 (*y-on-y*). Capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2021 mengalami perlambatan dibanding capaian pada triwulan II-2021. Kembali melonjaknya kasus Covid-19 mulai awal Juli mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa-Bali untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tempat umum. Kemudian seiring dengan melandainya jumlah kasus Covid-19, aktivitas masyarakat kembali meningkat pada bulan-bulan berikutnya.

Di tengah kembali lonjakan kasus Covid-19 gelombang kedua pada bulan Juli 2021, kinerja komponen konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh positif

sebesar 2,27 persen, meski mengalami perlambatan dibandingkan triwulan kedua tahun 2021 (*y-on-y*). Mulai terkendalinya penyebaran virus Covid-19 pada bulan Agustus dan September 2021 serta penurunan level PPKM di beberapa daerah, mendorong peningkatan aktivitas masyarakat sehingga konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh positif pada kuartal kedua tahun 2021. Sebagian besar subkomponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan positif. Beberapa subkomponen yang tumbuh relatif signifikan adalah pakaian (5,91 persen); perabot, peralatan rumah tangga dan pemeliharaan rutin rumah (5,02 persen); barang pribadi dan jasa perorangan (5,00 persen); serta makanan dan minuman non beralkohol (4,70 persen). Sementara itu, subkomponen pengeluaran rekreasi dan budaya terkontraksi paling dalam hingga 7,81 persen.

Komponen pengeluaran konsumsi LNPRT tumbuh 2,27 persen (*y-on-y*). Pertumbuhan konsumsi LNPRT didorong oleh peningkatan aktivitas lembaga non profit terutama pada wilayah dengan status PPKM level 1 dan 2. Selain itu peningkatan aktivitas lembaga keagamaan dan kegiatan bantuan vaksin massal oleh LNPRT turut mendorong pertumbuhan komponen ini.

Sama halnya dengan konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah pada triwulan III-2021 masih mengalami pertumbuhan positif, meskipun lebih lambat, yakni sebesar 0,80 persen jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2020 (*y-on-y*). Lambatnya pertumbuhan komponen ini disebabkan oleh masih terkontraksinya laju pertumbuhan subkomponen konsumsi kolektif, yakni sebesar 0,60 persen. Sedangkan untuk konsumsi individu sedikit mengalami akselerasi pertumbuhan sebesar 2,36 persen. Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada kuartal ketiga tahun 2021 didorong oleh peningkatan realisasi belanja barang APBN dan APBD, serta peningkatan belanja sosial pada APBD.

Pada triwulan III-2021 PMTB tumbuh positif sebesar 1,37 persen (*y-on-y*). Kebijakan pemerintah yang mengizinkan kegiatan konstruksi infrastruktur publik tetap beroperasi penuh selama pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat

mendorong peningkatan output kategori konstruksi pada periode ini. Selain itu, peningkatan total realisasi penanaman modal turut mendorong pertumbuhan aset fisik.

Ekspor luar negeri Jawa Timur pada triwulan III-2021 berkontraksi sebesar 8,65 persen dibanding triwulan yang sama tahun 2020 (*y-on-y*). Penurunan kinerja ekspor luar negeri disebabkan oleh penurunan ekspor baik barang maupun jasa. Pada jenis barang, penurunan ekspor luar negeri dikarenakan penurunan ekspor komoditas utama Jawa Timur seperti perhiasan, tembaga, ikan dan udang, serta kertas. Selain itu ekspor migas serta jumlah wisman juga mengalami penurunan.

Berbeda dengan kondisi ekspor luar negeri, pada triwulan III-2021 impor luar negeri Jawa Timur mengalami pertumbuhan positif sebesar 27,97 persen (*y-on-y*). Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan impor barang dari luar negeri, seperti peningkatan impor besi dan baja, ampas, pupuk, plastik dan barang dari plastik, serta gandum-gandum. Selain itu, kenaikan impor migas juga menyebabkan peningkatan impor dari luar negeri.

Dari sisi pertumbuhan *q-to-q*, pada triwulan III-2021 ekonomi Jawa Timur mengalami pertumbuhan sebesar 2,32 persen. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen PMTB sebesar 8,89 persen, diikuti oleh pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh 5,48 persen, dan diikuti konsumsi LNPR yang tumbuh 0,58 persen. Komponen pengeluaran dengan kontraksi terdalam adalah ekspor luar negeri yang berkontraksi sebesar 4,78 persen. Konsumsi rumah tangga juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,11 persen. Sementara itu, impor luar negeri turut berkontraksi sebesar 4,10 persen.

Pada triwulan III-2021 jika ditinjau dari sisi pengeluaran, ekonomi Jawa Timur ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 57,51 persen. Kemudian diikuti oleh PMTB dengan *share* mencapai 27,51 persen. Ekspor luar negeri memberikan kontribusi sebesar 13,54 persen. Di sisi lain, impor luar negeri yang berperan sebagai komponen pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran

berkontribusi sebesar 16,39 persen. Konsumsi pemerintah dan konsumsi LNPRT memberikan peranan sebesar 5,58 persen dan 1,19 persen.

3.2.4 PEREKONOMIAN JAWA TIMUR TRIWULAN IV-2021

Pemulihan perekonomian global tahun 2021 terus berlanjut sampai triwulan IV-2021. Pertumbuhan ekonomi dipicu oleh adanya pelonggaran aktivitas sehingga mendorong kenaikan permintaan global. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV-2021 mencapai 4,59 persen (*y-on-y*), mengalami akselerasi dibandingkan capaian pada triwulan III-2021. Seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif.

Konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama perekonomian Jawa Timur tumbuh 4,31 persen (*y-on-y*) pada kuartal keempat tahun 2021. Jika dibandingkan capaian pertumbuhan pada triwulan III-2021, kondisi pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan IV-2021 mengalami akselerasi yang signifikan. Akselerasi ini didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat seiring dengan terkendalinya kasus Covid-19 serta penurunan level PPKM di berbagai wilayah. Kondisi ini bertepatan dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru pada penghujung tahun. Kondisi ini mendorong pertumbuhan konsumsi pada kelompok konsumsi transportasi hingga 17,67 persen serta rekreasi dan budaya sebesar 11,56 persen.

Komponen pengeluaran konsumsi LNPRT pada triwulan IV-2021 tumbuh 4,24 persen (*y-on-y*), mengalami akselerasi pertumbuhan dibandingkan kondisi pada kuartal ketiga tahun 2021. Pertumbuhan ini didorong oleh adanya peningkatan pengadaan barang dan jasa organisasi kemasyarakatan serta peningkatan konsumsi listrik kategori sosial.

Tak jauh berbeda dengan konsumsi rumah tangga dan LNPRT, komponen konsumsi pemerintah pada kuartal III-2021 juga mengalami akselerasi pertumbuhan sebesar 1,02 persen (*y-on-y*). Pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong oleh kenaikan realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal APBD.

PMTB sebagai komponen penyumbang perekonomian terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,68 persen (*y-on-y*). Akselerasi pertumbuhan PMTB pada kuartal IV-2021 didorong oleh peningkatan nilai tambah kategori konstruksi yang signifikan sehingga mendorong penciptaan aset bangunan. Selain itu, peningkatan aset fisik juga diindikasikan dengan kenaikan impor barang modal serta peningkatan total realisasi investasi (penanaman modal) di Jawa Timur dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu.

Seiring dengan kenaikan permintaan global, ekspor luar negeri Jawa Timur pada triwulan IV-2021 tumbuh positif sebesar 8,49 persen (*y-on-y*) setelah berkontraksi pada kuartal ketiga tahun 2021. Pertumbuhan ekspor luar negeri pada kuartal ini didorong oleh kenaikan ekspor barang ke luar negeri, meskipun ekspor jasa mengalami penurunan yang signifikan. Ekspor non migas ke luar negeri mengalami kenaikan, meskipun ekspor migas mengalami penurunan. Beberapa komoditas ekspor ke luar negeri yang mengalami kenaikan adalah perhiasan, tembaga, kayu dan barang dari kayu, ikan dan udang, serta kertas.

Impor Jawa Timur dari luar negeri pada kuartal keempat tahun 2021 tumbuh signifikan mencapai 33,09 persen (*y-on-y*). Kenaikan impor luar negeri pada kuartal ini disebabkan oleh peningkatan impor barang non migas dan migas dari luar negeri, sedangkan impor jasa mengalami penurunan. Beberapa komoditas yang mengalami peningkatan signifikan pada periode ini adalah mesin-mesin, besi dan baja, pupuk, serta plastik dan barang dari plastik.

Dilihat dari sisi pertumbuhan *q-to-q*, ekonomi Jawa Timur triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 0,14 persen. Pada kuartal keempat ini, seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif jika dibandingkan triwulan sebelumnya (*q-to-q*). Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan IV-2021 tumbuh sebesar 5,01 persen, sedangkan konsumsi LNPRT tumbuh 2,03 persen, dan konsumsi pemerintah tumbuh signifikan hingga 9,61 persen. Kemudian komponen PMTB mengalami pertumbuhan sebesar 1,46 persen. Ekspor luar negeri

mengalami pertumbuhan 1,35 persen sedangkan impor luar negeri naik signifikan hingga 16,44 persen.

Terakhir, struktur ekonomi Jawa Timur jika ditinjau dari sisi pengeluaran, secara konsisten didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan PMTB dengan kontribusi masing-masing sebesar 59,58 persen dan 27,67 persen. Selanjutnya, ekspor luar negeri berkontribusi sebesar 13,99 persen terhadap ekonomi Jawa Timur. Di sisi lain, impor luar negeri yang berperan sebagai komponen pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran berkontribusi sebesar 19,38 persen. Konsumsi pemerintah dan konsumsi LNPRT memberikan *share* sebesar 6,05 persen dan 1,19 persen.

<https://jatim.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://jatim.bps.go.id>

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2017 - 2021 (Miliar Rupiah)

Tabel 1.

Komponen Pengeluaran	2017				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	285 813	297 823	305 214	305 065	1 193 915
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5 575	5 928	5 882	6 014	23 400
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18 972	27 501	31 371	31 601	109 444
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	133 610	139 258	146 427	149 671	568 965
5. Perubahan Inventori	6 627	6 620	9 478	3 219	25 944
6. Ekspor Luar Negeri	65 052	64 281	71 425	68 653	269 410
7. Impor Luar Negeri	82 569	78 163	84 225	88 780	333 737
8. Net Ekspor Antar Daerah	46 491	33 777	35 951	39 358	155 577
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	479 571	497 024	521 523	514 800	2 012 918

Tabel 1. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2018				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	308 937	326 925	330 357	332 171	1 298 390
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6 112	6 493	6 623	6 485	25 712
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21 277	29 727	33 842	36 146	120 991
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	145 258	150 893	160 386	164 093	620 630
5. Perubahan Inventori	6 448	6 854	11 454	3 638	28 393
6. Ekspor Luar Negeri	71 177	68 079	80 273	77 399	296 929
7. Impor Luar Negeri	84 784	97 805	113 530	112 216	408 335
8. Net Ekspor Antar Daerah	47 048	52 836	59 065	47 107	206 055
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	521 472	544 001	568 470	554 823	2 188 766

Tabel 1. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2019				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	334 202	352 025	354 685	355 693	1 396 604
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6 843	7 195	6 866	6 985	27 888
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	23 121	32 231	36 053	39 599	131 004
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	155 395	164 486	173 614	176 496	669 991
5. Perubahan Inventori	6 067	7 563	11 676	3 829	29 135
6. Ekspor Luar Negeri	72 070	70 731	74 005	71 687	288 493
7. Impor Luar Negeri	88 654	92 209	91 130	97 204	369 198
8. Net Ekspor Antar Daerah	52 550	42 121	39 550	37 411	171 632
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	561 593	584 142	605 318	594 496	2 345 549

Tabel 1. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2020*)				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	355 722	336 400	346 014	360 381	1 398 517
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7 173	7 040	7 120	7 149	28 482
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	25 435	32 582	34 298	37 572	129 887
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	163 268	152 428	167 446	164 751	647 893
5. Perubahan Inventori	5 603	1 990	2 023	2 189	11 805
6. Ekspor Luar Negeri	81 506	71 858	87 093	77 070	317 527
7. Impor Luar Negeri	85 778	79 229	76 225	85 020	326 251
8. Net Ekspor Antar Daerah	29 896	26 134	18 846	17 056	91 932
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	582 825	549 203	586 614	581 148	2 299 791

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 1. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2021**)				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	354 034	363 291	359 812	378 257	1 455 394
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7 224	7 358	7 417	7 581	29 581
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	25 727	32 876	34 915	38 419	131 937
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	161 531	157 224	172 107	175 677	666 539
5. Perubahan Inventori	5 714	6 047	4 742	5 108	21 611
6. Ekspor Luar Negeri	77 078	88 555	84 702	88 800	339 135
7. Impor Luar Negeri	91 681	105 449	102 568	123 019	422 718
8. Net Ekspor Antar Daerah	48 861	55 610	64 507	64 042	233 021
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	588 488	605 512	625 633	634 865	2 454 499

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)**

Tabel 2.

Komponen Pengeluaran	2017				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	215 902	221 276	223 893	222 940	884 012
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3 532	3 689	3 638	3 681	14 540
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12 118	16 419	18 642	20 396	67 575
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	96 611	100 005	104 582	105 987	407 185
5. Perubahan Inventori	4 268	4 242	7 194	2 320	18 024
6. Ekspor Luar Negeri	48 439	47 610	52 832	49 220	198 101
7. Impor Luar Negeri	65 960	60 795	65 844	66 905	259 504
8. Net Ekspor Antar Daerah	41 558	35 587	38 061	37 160	152 366
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	356 467	368 034	382 998	374 800	1 482 300

Tabel 2. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2018				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	223 846	233 728	234 826	234 383	926 784
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3 712	3 879	3 937	3 967	15 495
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12 833	17 181	19 437	21 306	70 757
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	102 208	105 717	111 382	112 615	431 922
5. Perubahan Inventori	4 146	4 385	7 320	2 410	18 262
6. Ekspor Luar Negeri	51 003	48 697	56 373	53 904	209 977
7. Impor Luar Negeri	62 919	67 746	75 593	75 437	281 694
8. Net Ekspor Antar Daerah	40 921	42 660	45 973	42 385	171 938
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	375 751	388 502	403 656	395 533	1 563 442

Tabel 2. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2019				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	234 753	245 152	245 996	245 492	971 393
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4 128	4 252	3 996	4 044	16 420
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13 401	18 231	20 183	22 075	73 889
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	106 101	111 293	117 074	118 721	453 189
5. Perubahan Inventori	3 898	4 797	7 380	2 421	18 496
6. Ekspor Luar Negeri	53 930	51 417	53 218	50 601	209 165
7. Impor Luar Negeri	62 062	64 980	62 409	66 413	255 864
8. Net Ekspor Antar Daerah	42 654	40 857	39 754	39 943	163 207
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	396 802	411 019	425 192	416 883	1 649 896

Tabel 2. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2020*)				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	245 239	233 418	238 824	245 885	963 366
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4 119	4 106	4 114	4 118	16 457
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14 058	18 013	18 851	20 618	71 539
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	110 074	102 222	111 727	109 770	433 793
5. Perubahan Inventori	3 527	1 248	1 264	1 363	7 402
6. Ekspor Luar Negeri	60 698	50 760	64 197	54 791	230 446
7. Impor Luar Negeri	62 089	55 522	54 808	61 362	233 781
8. Net Ekspor Antar Daerah	32 672	32 671	26 288	30 654	122 286
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	408 298	386 917	410 457	405 836	1 611 508

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2021**)				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	241 537	246 999	244 251	256 487	989 274
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4 113	4 183	4 207	4 293	16 796
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14 133	18 014	19 001	20 828	71 976
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	107 184	104 016	113 259	114 910	439 369
5. Perubahan Inventori	3 534	3 724	2 904	3 104	13 266
6. Ekspor Luar Negeri	54 473	61 590	58 647	59 442	234 153
7. Impor Luar Negeri	66 253	73 132	70 135	81 665	291 185
8. Net Ekspor Antar Daerah	47 788	48 875	51 737	47 067	195 467
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	406 510	414 270	423 872	424 465	1 669 117

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Persen)

Tabel 3.

Komponen Pengeluaran	2017				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,60	59,92	58,52	59,26	59,31
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,16	1,19	1,13	1,17	1,16
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,96	5,53	6,02	6,14	5,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,86	28,02	28,08	29,07	28,27
5. Perubahan Inventori	1,38	1,33	1,82	0,63	1,29
6. Ekspor Luar Negeri	13,56	12,93	13,70	13,34	13,38
7. Impor Luar Negeri	17,22	15,73	16,15	17,25	16,58
8. Net Ekspor Antar Daerah	9,69	6,80	6,89	7,65	7,73
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 3. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2018				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,24	60,10	58,11	59,87	59,32
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,17	1,19	1,16	1,17	1,17
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,08	5,46	5,95	6,51	5,53
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,86	27,74	28,21	29,58	28,36
5. Perubahan Inventori	1,24	1,26	2,01	0,66	1,30
6. Ekspor Luar Negeri	13,65	12,51	14,12	13,95	13,57
7. Impor Luar Negeri	16,26	17,98	19,97	20,23	18,66
8. Net Ekspor Antar Daerah	9,02	9,71	10,39	8,49	9,41
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 3. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2019				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,51	60,26	58,59	59,83	59,54
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,22	1,23	1,13	1,17	1,19
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,12	5,52	5,96	6,66	5,59
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,67	28,16	28,68	29,69	28,56
5. Perubahan Inventori	1,08	1,29	1,93	0,64	1,24
6. Ekspor Luar Negeri	12,83	12,11	12,23	12,06	12,30
7. Impor Luar Negeri	15,79	15,79	15,05	16,35	15,74
8. Net Ekspor Antar Daerah	9,36	7,21	6,53	6,29	7,32
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 3. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2020*)				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	61,03	61,25	58,98	62,01	60,81
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,23	1,28	1,21	1,23	1,24
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,36	5,93	5,85	6,47	5,65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,01	27,75	28,54	28,35	28,17
5. Perubahan Inventori	0,96	0,36	0,34	0,38	0,51
6. Ekspor Luar Negeri	13,98	13,08	14,85	13,26	13,81
7. Impor Luar Negeri	14,72	14,43	12,99	14,63	14,19
8. Net Ekspor Antar Daerah	5,13	4,76	3,21	2,93	4,00
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2021**)				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,16	60,00	57,51	59,58	59,29
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,23	1,22	1,19	1,19	1,21
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,37	5,43	5,58	6,05	5,38
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,45	25,97	27,51	27,67	27,16
5. Perubahan Inventori	0,97	1,00	0,76	0,80	0,88
6. Ekspor Luar Negeri	13,10	14,62	13,54	13,99	13,82
7. Impor Luar Negeri	15,58	17,41	16,39	19,38	17,22
8. Net Ekspor Antar Daerah	8,30	9,18	10,31	10,09	9,49
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2017 - 2021 (persen)

Tabel 4.

Komponen Pengeluaran	2017				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,57	60,12	58,46	59,48	59,64
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,99	1,00	0,95	0,98	0,98
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,40	4,46	4,87	5,44	4,56
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,10	27,17	27,31	28,28	27,47
5. Perubahan Inventori	1,20	1,15	1,88	0,62	1,22
6. Ekspor Luar Negeri	13,59	12,94	13,79	13,13	13,36
7. Impor Luar Negeri	18,50	16,52	17,19	17,85	17,51
8. Net Ekspor Antar Daerah	11,66	9,67	9,94	9,91	10,28
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 4. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2018				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,57	60,16	58,17	59,26	59,28
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,99	1,00	0,98	1,00	0,99
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,42	4,42	4,82	5,39	4,53
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,20	27,21	27,59	28,47	27,63
5. Perubahan Inventori	1,10	1,13	1,81	0,61	1,17
6. Ekspor Luar Negeri	13,57	12,53	13,97	13,63	13,43
7. Impor Luar Negeri	16,74	17,44	18,73	19,07	18,02
8. Net Ekspor Antar Daerah	10,89	10,98	11,39	10,72	11,00
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 4. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2019				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,16	59,65	57,86	58,89	58,88
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,04	1,03	0,94	0,97	1,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,38	4,44	4,75	5,30	4,48
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,74	27,08	27,53	28,48	27,47
5. Perubahan Inventori	0,98	1,17	1,74	0,58	1,12
6. Ekspor Luar Negeri	13,59	12,51	12,52	12,14	12,68
7. Impor Luar Negeri	15,64	15,81	14,68	15,93	15,51
8. Net Ekspor Antar Daerah	10,75	9,94	9,35	9,58	9,89
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 4. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2020*)				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,06	60,33	58,18	60,59	59,78
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,01	1,06	1,00	1,01	1,02
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,44	4,66	4,59	5,08	4,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,96	26,42	27,22	27,05	26,92
5. Perubahan Inventori	0,86	0,32	0,31	0,34	0,46
6. Ekspor Luar Negeri	14,87	13,12	15,64	13,50	14,30
7. Impor Luar Negeri	15,21	14,35	13,35	15,12	14,51
8. Net Ekspor Antar Daerah	8,00	8,44	6,40	7,55	7,59
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2021**)				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,42	59,62	57,62	60,43	59,27
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,01	1,01	0,99	1,01	1,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,48	4,35	4,48	4,91	4,31
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,37	25,11	26,72	27,07	26,32
5. Perubahan Inventori	0,87	0,90	0,69	0,73	0,79
6. Ekspor Luar Negeri	13,40	14,87	13,84	14,00	14,03
7. Impor Luar Negeri	16,30	17,65	16,55	19,24	17,45
8. Net Ekspor Antar Daerah	11,76	11,80	12,21	11,09	11,71
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Triwulanan Menurut Pengeluaran (q to q) Tahun 2017-2021 (Persen)

Tabel 5.

Komponen Pengeluaran	2017				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,46	2,49	1,18	(0,43)	4,51
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	(1,44)	4,47	(1,39)	1,18	2,35
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(37,64)	35,50	13,54	9,41	3,58
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	(3,32)	3,51	4,58	1,34	5,29
5. Perubahan Inventori	121,61	(0,60)	69,58	(67,75)	2,04
6. Ekspor Luar Negeri	0,66	(1,71)	10,97	(6,84)	(5,23)
7. Impor Luar Negeri	0,20	(7,83)	8,30	1,61	7,68
8. Net Ekspor Antar Daerah	28,63	(14,37)	6,95	(2,37)	41,27
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	0,59	3,24	4,07	(2,14)	5,46

Tabel 5. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2018				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,41	4,41	0,47	(0,19)	4,84
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,84	4,49	1,52	0,75	6,57
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(37,08)	33,89	13,13	9,62	4,71
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	(3,57)	3,43	5,36	1,11	6,08
5. Perubahan Inventori	78,70	5,76	66,93	(67,08)	1,32
6. Ekspor Luar Negeri	3,62	(4,52)	15,76	(4,38)	5,99
7. Impor Luar Negeri	(5,96)	7,67	11,58	(0,21)	8,55
8. Net Ekspor Antar Daerah	10,12	4,25	7,76	(7,80)	12,85
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	0,25	3,39	3,90	(2,01)	5,47

Tabel 5. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2019				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,16	4,43	0,34	(0,21)	4,81
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,06	3,01	(6,04)	1,20	5,97
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(37,11)	36,05	10,70	9,37	4,43
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	(5,78)	4,89	5,19	1,41	4,92
5. Perubahan Inventori	61,75	23,08	53,83	(67,19)	1,28
6. Ekspor Luar Negeri	0,05	(4,66)	3,50	(4,92)	(0,39)
7. Impor Luar Negeri	(17,73)	4,70	(3,96)	6,42	(9,17)
8. Net Ekspor Antar Daerah	0,64	(4,21)	(2,70)	0,48	(5,08)
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	0,32	3,58	3,45	(1,95)	5,53

Tabel 5. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2020*)				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	(0,10)	(4,82)	2,32	2,96	(0,83)
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,86	(0,31)	0,20	0,10	0,23
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(36,32)	28,14	4,65	9,37	(3,18)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	(7,28)	(7,13)	9,30	(1,75)	(4,28)
5. Perubahan Inventori	45,65	(64,60)	1,21	7,87	(59,98)
6. Ekspor Luar Negeri	19,96	(16,37)	26,47	(14,65)	10,17
7. Impor Luar Negeri	(6,51)	(10,58)	(1,29)	11,96	(8,63)
8. Net Ekspor Antar Daerah	(18,20)	(0,00)	(19,54)	16,61	(25,07)
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	(2,06)	(5,24)	6,08	(1,13)	(2,33)

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 5. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2021**)				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	(1,77)	2,26	(1,11)	5,01	2,69
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	(0,12)	1,70	0,58	2,03	2,06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(31,45)	27,46	5,48	9,61	0,61
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	(2,36)	(2,96)	8,89	1,46	1,29
5. Perubahan Inventori	159,28	5,36	(22,02)	6,91	79,22
6. Ekspor Luar Negeri	(0,58)	13,06	(4,78)	1,35	1,61
7. Impor Luar Negeri	7,97	10,38	(4,10)	16,44	24,55
8. Net Ekspor Antar Daerah	55,90	2,27	5,86	(9,03)	59,85
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	0,17	1,91	2,32	0,14	3,57

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Perubahan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Triwulanan (2010 = 100) Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Persen)

Tabel 6.

Komponen Pengeluaran	2017				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	132,38	134,59	136,32	136,84	135,06
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	157,87	160,67	161,67	163,39	160,93
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	156,56	167,49	168,28	154,93	161,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	138,30	139,25	140,01	141,22	139,73
5. Perubahan Inventori	155,29	156,05	131,75	138,71	143,94
6. Ekspor Luar Negeri	134,30	135,01	135,19	139,48	136,00
7. Impor Luar Negeri	125,18	128,57	127,92	132,69	128,61
8. Net Ekspor Antar Daerah	111,87	94,92	94,46	105,91	102,11
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	134,53	135,05	136,17	137,35	135,80

Tabel 6. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2018				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	138,01	139,87	140,68	141,72	140,10
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	164,65	167,41	168,19	163,47	165,94
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	165,80	173,02	174,11	169,65	170,99
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	142,12	142,73	144,00	145,71	143,69
5. Perubahan Inventori	155,50	156,29	156,47	150,97	155,48
6. Ekspor Luar Negeri	139,55	139,80	142,40	143,59	141,41
7. Impor Luar Negeri	134,75	144,37	150,19	148,76	144,96
8. Net Ekspor Antar Daerah	114,97	123,85	128,48	111,14	119,84
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	138,78	140,03	140,83	140,27	140,00

Tabel 6. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2019				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	142,36	143,59	144,18	144,89	143,77
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	165,75	169,19	171,83	172,74	169,84
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	172,54	176,79	178,63	179,39	177,30
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	146,46	147,80	148,29	148,66	147,84
5. Perubahan Inventori	155,64	157,65	158,22	158,15	157,52
6. Ekspor Luar Negeri	133,64	137,56	139,06	141,67	137,93
7. Impor Luar Negeri	142,85	141,90	146,02	146,36	144,29
8. Net Ekspor Antar Daerah	123,20	103,09	99,49	93,66	105,16
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	141,53	142,12	142,36	142,60	142,16

Tabel 6. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2020*)				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	145,05	144,12	144,88	146,56	145,17
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	174,16	171,46	173,06	173,60	173,07
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	180,93	180,88	181,95	182,23	181,56
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	148,33	149,11	149,87	150,09	149,36
5. Perubahan Inventori	158,88	159,39	160,10	160,59	159,49
6. Ekspor Luar Negeri	134,28	141,56	135,66	140,66	137,79
7. Impor Luar Negeri	138,15	142,70	139,08	138,55	139,55
8. Net Ekspor Antar Daerah	91,50	79,99	71,69	55,64	75,18
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	142,75	141,94	142,92	143,20	142,71

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 6. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2021**)				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	146,58	147,08	147,31	147,48	147,12
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	175,64	175,90	176,30	176,60	176,11
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	182,04	182,50	183,75	184,46	183,31
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	150,70	151,15	151,96	152,88	151,70
5. Perubahan Inventori	161,67	162,40	163,31	164,56	162,91
6. Ekspor Luar Negeri	141,50	143,78	144,43	149,39	144,83
7. Impor Luar Negeri	138,38	144,19	146,24	150,64	145,17
8. Net Ekspor Antar Daerah	102,25	113,78	124,68	136,07	119,21
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	144,77	146,16	147,60	149,57	147,05

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 7. Laju Perubahan Indeks Harga Implisit
Produk Domestik Regional Bruto Triwulanan (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (persen)**

Tabel 7. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2017				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,67	1,67	1,28	0,38	3,01
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,05	1,77	0,62	1,06	3,12
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,46	6,98	0,47	(7,93)	5,10
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,74	0,69	0,55	0,86	4,28
5. Perubahan Inventori	14,21	0,49	(15,57)	5,28	0,11
6. Ekspor Luar Negeri	0,04	0,53	0,13	3,17	7,47
7. Impor Luar Negeri	(0,01)	2,71	(0,51)	3,74	5,54
8. Net Ekspor Antar Daerah	5,21	(15,16)	(0,48)	12,13	0,49
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	1,11	0,38	0,83	0,87	2,85

Tabel 7. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2018				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,86	1,35	0,58	0,74	3,73
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,77	1,68	0,47	(2,81)	3,11
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,01	4,35	0,63	(2,56)	5,58
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,64	0,43	0,89	1,19	2,83
5. Perubahan Inventori	12,10	0,51	0,11	(3,51)	8,02
6. Ekspor Luar Negeri	0,05	0,18	1,86	0,84	3,98
7. Impor Luar Negeri	1,55	7,14	4,03	(0,95)	12,71
8. Net Ekspor Antar Daerah	8,55	7,72	3,73	(13,49)	17,37
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	1,04	0,90	0,57	(0,40)	3,09

Tabel 7. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2019				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,45	0,86	0,41	0,49	2,62
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,40	2,08	1,56	0,53	2,35
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,70	2,47	1,04	0,42	3,69
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,51	0,91	0,34	0,25	2,89
5. Perubahan Inventori	3,09	1,29	0,37	(0,05)	1,31
6. Ekspor Luar Negeri	(6,93)	2,94	1,09	1,88	(2,46)
7. Impor Luar Negeri	(3,97)	(0,66)	2,90	0,23	(0,46)
8. Net Ekspor Antar Daerah	10,85	(16,32)	(3,50)	(5,86)	(12,25)
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	0,90	0,42	0,17	0,17	1,55

Tabel 7. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2020*)				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,11	(0,64)	0,53	1,16	0,97
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,82	(1,55)	0,93	0,31	1,90
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,86	(0,03)	0,59	0,16	2,40
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	(0,23)	0,53	0,51	0,14	1,03
5. Perubahan Inventori	0,46	0,32	0,45	0,31	1,25
6. Ekspor Luar Negeri	(5,22)	5,42	(4,17)	3,68	(0,10)
7. Impor Luar Negeri	(5,61)	3,29	(2,54)	(0,38)	(3,28)
8. Net Ekspor Antar Daerah	(2,31)	(12,58)	(10,38)	(22,39)	(28,51)
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	0,10	(0,56)	0,69	0,20	0,38

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 7. (Lanjutan)

Komponen Pengeluaran	2021**)				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,01	0,35	0,16	0,11	1,34
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,17	0,15	0,23	0,17	1,76
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(0,10)	0,25	0,68	0,39	0,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,41	0,30	0,53	0,61	1,57
5. Perubahan Inventori	0,67	0,45	0,56	0,77	2,15
6. Ekspor Luar Negeri	0,59	1,61	0,45	3,44	5,11
7. Impor Luar Negeri	(0,12)	4,20	1,42	3,01	4,03
8. Net Ekspor Antar Daerah	83,76	11,28	9,58	9,13	58,57
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	1,10	0,97	0,98	1,33	3,04

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Kendangsari Industri No.43-44 Surabaya 60292
Telp : (031) 8439343 ; Fax : (031) 8494007
Homepage: <https://jatim.bps.go.id>
Email: bps3500@bps.go.id

